

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN
KEPEMILIKAN SAHAM PUBLIK TERHADAP TINGKAT
PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY***

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta untuk
Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :

REZA MANJALANG MUDA SIREGAR

12812144013

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2016**

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN
KEPEMILIKAN SAHAM PUBLIK TERHADAP TINGKAT
PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY***

SKRIPSI

Oleh:

Reza Manjalang Muda Siregar

NIM. 12812144013

Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal 3 Oktober 2016

Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Program Studi Akuntansi

Jurusan Pendidikan Akuntansi

Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui

Dosen Pembimbing,



Dr. Denies Priantinah, M.Si., Ak., CA.

NIP. 19740509 200501 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN KEPEMILIKAN SAHAM PUBLIK TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*


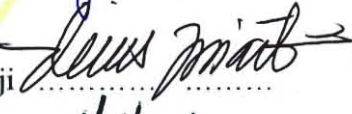
Disusun Oleh:

REZA MANJALANG MUDA SIREGAR

NIM. 12812144013

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 24 Oktober 2016 dan dinyatakan lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Abdullah Taman, M.Si., Ak., CA.	Ketua Penguji		02-11-2016
Dr. Denies Priantinah, M.Si., Ak., CA.	Sekretaris Penguji		03-11-2016
RR Indah Mustikawati, M.Si., Ak., CA.	Penguji Utama		01-11-2016

Yogyakarta, 7 November 2016

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta



Dr. Sugiharsono, M.Si
NIP. 19550328 198303 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Reza Manjalang Muda Siregar

NIM : 12812144013

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul Tugas Akhir : PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN
KEPEMILIKAN SAHAM PUBLIK TERHADAP TINGKAT
PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan dalam keadaan yang tidak dipaksa.

Yogyakarta, 6 Oktober 2016

Penulis,



Reza Manjalang Muda Siregar

NIM. 12812144013

MOTTO

“Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka, dan sungguh akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kalian memahaminya?”

(Al-An'am : 32)

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal itu amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”

(Al-Baqarah :216)

“I had to deny knowledge in order to make room for faith”

(Immanuel Kant)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut syukur kehadiran Allah SWT, peneliti mempersembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Kedua orangtua tercinta, Bapak Mahdi Siregar dan Ibu Suyati yang senantiasa memberikan motivasi dan doa.
2. Almamaterku Universitas Negeri Yogyakarta.

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN KEPEMILIKAN SAHAM PUBLIK TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

Oleh:

Reza Manjalang Muda Siregar
12812144013

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Tingkat Pengungkapan CSR, (2) Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Tingkat Pengungkapan CSR, (3) Pengaruh Komposisi Kepemilikan Saham Institusional terhadap Tingkat Pengungkapan CSR, (4) pengaruh Komposisi Kepemilikan Saham Asing terhadap Tingkat Pengungkapan CSR, (5) Pengaruh Komposisi Kepemilikan Saham Publik terhadap Tingkat Pengungkapan CSR, (6) Pengaruh Ukuran Komite Audit, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Komposisi Kepemilikan Institusi, Komposisi Kepemilikan Asing, dan Komposisi Kepemilikan Publik terhadap Tingkat Pengungkapan CSR.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel yang digunakan sebanyak 76 perusahaan dari total populasi sebanyak 82 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 dan 2014. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi linear sederhana dan uji regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Ukuran Komite Audit dan Komposisi Kepemilikan Asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Variabel Komposisi Kepemilikan Publik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Sedangkan variabel Komposisi Dewan Komisaris Independen dan Komposisi Kepemilikan Institusi tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hasil uji serempak menunjukkan hasil yang positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Kata kunci: *Corporate Social Responsibility*, *Good Corporate Governance* (Ukuran Komite Audit, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Komposisi Kepemilikan Institusi, Komposisi Kepemilikan Asing), Komposisi Kepemilikan Publik, *Global Reporting Initiative (GRI)*.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE AND PUBLIC OWNERSHIP EFFECT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

By:
Reza Manjalang Muda Siregar
12812144013

ABSTRACT

This study aims to determine (1) Correlation between Audit Comitee to CSR disclosure level, (2) Correlation between Board Independence to CSR disclosure level, (3) Correlation between Institutional Ownership to CSR disclosure level, (4) Correlation between Foreign Ownership to CSR disclosure level, (5) Correlation between Public Ownership to CSR disclosure, (6) Correlation between Audit Comitee, Board Independence, Institutional Ownership, Foreign Ownership and Public Ownership to CSR disclosure level.

This study uses secondary data and purposive sampling method. Processing and analysis of data in this study use simple and multiple linear regression. The sample in this study is 76 companies from total population of 82 mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013 and 2014.

The results of this study indicate that the variable size of the audit committee and composition of foreign ownership has significant positive effect on the level of disclosure of corporate social responsibility. Composition of Public Ownership variable shows the negative and significant result. While the variable Composition Of Independence Board and Composition Of Institutional Ownership did not significantly affect the level of Corporate Social Responsibility disclosure. Multiple linear regression test shows the positive and significant result towards the level of Corporate Social Responsibility disclosure.

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance (the size of the audit committee, the composition of the independent board, Composition of Institutional Ownership, Composition of Foreign Ownership), Composition of Public Ownership, Global Reporting Initiative (GRI).*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang Maha Rahman dan Maha Rahim yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Rasulullah Muhammad SAW yang telah diutus ke bumi untuk membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh rahmat.

Penyusunan skripsi yang berjudul “**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN KEPEMILIKAN SAHAM PUBLIK TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*”**”, disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Sarjana (Strata-1) Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

3. Abdullah Taman, M.Si., Ak., CA., Ketua Jurusan Pendidikan Akuntansi dan dosen Ketua Penguji.
4. Dr. Denies Priantinah, M.Si., Ak., CA, Ketua Program Studi Akuntansi dan dosen pemimbing sekaligus Sekretaris Penguji yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, masukan, serta motivasi kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. RR. Indah Mustikawati, SE., Akt., M.Si., dosen narasumber sekaligus Penguji Utama yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, masukan, serta motivasi kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah ikut membantu selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menerima segala saran dan kritik membangun yang dapat membantu kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Oktober 2016

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Reza' followed by a stylized surname.

Reza Manjalang Muda Siregar

NIM. 12812144013

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Pembatasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	9

F.	Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....		11
A.	Landasan Teori	11
1.	Teori Legitimasi	11
2.	Teori Agensi	13
3.	<i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	15
4.	<i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	26
5.	Kepemilikan Publik	36
B.	Penelitian Relevan	38
C.	Kerangka Berpikir.....	40
1.	Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Tingkat Pengungkapan CSR.....	40
2.	Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Tingkat Pengungkapan CSR.....	41
3.	Pengaruh Komposisi Kepemilikan Institusional terhadap Tingkat Pengungkapan CSR.....	42
4.	Pengaruh Komposisi Kepemilikan Asing terhadap Tingkat Pengungkapan CSR.....	43

5.	Pengaruh komposisi kepemilikan Saham Publik terhadap Tingkat Pengungkapan CSR.....	44
D.	Paradigma Penelitian	46
E.	Hipotesis Penelitian	47
BAB III METODE PENELITIAN		48
A.	Desain Penelitian	48
B.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	48
C.	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	49
1.	Variabel Dependen	49
2.	Variabel Independen.....	50
D.	Populasi dan Sampel Penelitian.....	52
E.	Metode Pengumpulan Data.....	54
F.	Metode Analisis Data.....	55
1.	Analisis Statistik Deskriptif.....	55
2.	Uji Asumsi Klasik	55
3.	Analisis Regresi Sederhana	58
4.	Analisis Regresi Berganda	59
5.	Pengujian Hipotesis	60
6.	Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	62

7.	Uji Adjusted R Squared (Adj. R^2)	63
8.	Uji Parsial (t test).....	63
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....		65
A.	Deskripsi Data.....	65
B.	Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	66
1.	<i>Corporate Social Responsibility</i>	67
2.	Komite Audit	69
3.	Dewan Komisaris Independen.....	72
4.	Kepemilikan Institusi.....	75
5.	Kepemilikan Asing.....	77
6.	Kepemilikan Publik	81
B.	Uji Asumsi Klasik.....	83
1.	Uji Normalitas	84
2.	Uji Multikolinearitas	84
3.	Uji Heteroskedastisitas	85
4.	Uji Autokorelasi	86
C.	Hasil Uji Hipotesis.....	87
1.	Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Tingkat Pengungkapan CSR	87

2.	Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Tingkat Pengungkapan CSR.....	90
3.	Pengaruh Komposisi Kepemilikan Institusi terhadap Tingkat Pengungkapan CSR.....	92
4.	Pengaruh Komposisi Kepemilikan Asing terhadap Tingkat Pengungkapan CSR.....	95
5.	Pengaruh Komposisi Kepemilikan Publik terhadap Tingkat Pengungkapan CSR.....	98
6.	Pengaruh Ukuran Komite Audit, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Komposisi Kepemilikan Institusi, Komposisi Kepemilikan Asing, dan Komposisi Kepemilikan Publik terhadap Tingkat Pengungkapan CSR.....	101
D.	Pembahasan	105
1.	Pembahasan Hipotesis Pertama.....	105
2.	Pembahasan Hipotesis Kedua.....	107
3.	Pembahasan Hipotesis Ketiga	108
4.	Pembahasan Hipotesis Keempat.....	109
5.	Pembahasan Hipotesis Kelima	112
6.	Pembahasan Hipotesis Keenam.....	113

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN.....	126

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Indikator Pengungkapan CSR Menurut GRI	16
2. Prosedur Pemilihan Sampel	53
3. Daftar Sampel Perusahaan	53
4. Hasil Uji Statistik Deskriptif	67
5. Distribusi Frekuensi CSR.....	68
6. Distribusi frekuensi Komite Audit	71
7. Distribusi frekuensi Komposisi Dewan Komisaris Independen	73
8. Distribusi frekuensi Komposisi Kepemilikan Institusi	76
9. Distribusi frekuensi Komposisi Kepemilikan Asing.....	79
10. Distribusi frekuensi Komposisi Kepemilikan Publik	82
11. Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	84
12. Hasil Uji Multikolinieritas	85
13. Hasil Uji Heteroskedastisitas	86
14. Hasil Uji Autokorelasi	87
15. Hasil Uji Regresi Hipotesis 1.....	88
16. Koefisien Determinasi Komite Audit	89
17. Hasil Uji Regresi Hipotesis 2.....	90
18. Koefisien Determinasi Komposisi Dewan Komisaris Independen.....	92
19. Hasil Uji Regresi Hipotesis 3.....	93
20. Koefisien Determinasi Komposisi Kepemilikan Institusi.....	95

21. Hasil Uji Regresi Hipotesis 4.....	96
22. Koefisien Determinasi Komposisi Kepemilikan Asing.....	97
23. Hasil Uji Regresi 5.....	98
24. Koefisien Determinasi Komposisi Kepemilikan Publik.....	101
25. Hasil Uji Regresi Hipotesis 6.....	102
26. Hasil Uji F Hipotesis 6.....	104
27. Koefisien Determinasi	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Paradigma Penelitian	46
2. Histogram Distribusi Frekuensi CSR.....	69
3. Histogram Distribusi Frekuensi Komite Audit	71
4. Histogram Distribusi Frekuensi Komposisi Dewan Komisaris Independen	74
5. Histogram Distribusi Frekuensi Komposisi Kepemilikan Institusi	77
6. Histogram Distribusi Frekuensi Komposisi Kepemilikan Asing.....	80
7. Histogram Distribusi Frekuensi Komposisi Kepemilikan Publik.....	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Sampel Perusahaan Sektor Tambang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2014	127
2. Data Tingkat Pengungkapan CSR	129
3. Data Komite Audit	132
4. Data Komposisi Dewan Komisaris Independen.....	135
5. Data Komposisi Kepemilikan Institusi	138
6. Data Komposisi Kepemilikan Asing.....	141
7. Data Komposisi Kepemilikan Publik.....	144
8. Pasal 74 Undang-Undang Ri Nomor 40 Tahun 2007	147
9. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) No.1 (Revisi 1998)	149
10,Hasil Analisis Statistik Deskriptif dan Uji Asumsi Klasik	151
11 Hasil Uji Hipotesis	154

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya untuk meningkatkan penerapan aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia salah satunya dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pada pasal 74. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa kegiatan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu kegiatan yang diwajibkan dan dilaksanakan berdasarkan pada kepatutan dan kewajaran sesuai dengan peraturan pemerintah. Pada kenyataannya tingkat pengungkapan CSR di Indonesia masih relatif rendah. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cahaya dkk. (2008) yang menunjukkan bahwa dari 100 sampel perusahaan di Indonesia rata-rata tingkat pengungkapan tanggung jawab sosialnya berada di angka 14,15%.

CSR diharapkan dapat menjaga keberlangsungan usaha perusahaan agar bertahan dalam jangka panjang dan perusahaan dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat serta lingkungan sekitar. Perusahaan melakukan tanggung jawab sosial dengan tujuan agar keberlangsungan hidup perusahaan tetap terjaga dan juga keuntungan perusahaan dalam jangka panjang harus selaras dengan keadilan sosial dan perlindungan terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Pernyataan ini berdasarkan pedoman *Global Reporting Initiatives* (GRI) (2013) yang menyatakan bahwa

semakin banyak perusahaan dan organisasi lain yang ingin membuat operasional mereka berkelanjutan.

Sinaga (2011) menyatakan bahwa tekanan dari berbagai pihak memaksa perusahaan untuk menerima tanggung jawab atas dampak aktivitas bisnisnya, oleh karena itu CSR memainkan peran penting sebagai sarana komunikasi antara perusahaan dan masyarakat (Habbash, 2015). Said, Zainuddin dan Haron (2009) menyatakan bahwa CSR mampu meningkatkan kinerja keuangan, meningkatkan citra perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan. Pada era informasi dan teknologi serta desakan globalisasi, tuntutan menjalankan CSR semakin besar. Oleh karena itu, di dalam praktik, penerapan CSR selalu disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Namun pada kenyataannya CSR masih dianggap sepele dan dilakukan hanya untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat sekitar.

Di dunia internasional timbul kekhawatiran antara hubungan bisnis dan masyarakat, ini menyebabkan timbulnya organisasi yang bertujuan untuk memantau dan membantu perusahaan berperilaku sosial dan bertanggung jawab. Contoh organisasi-organisasi tersebut ialah *African Institute of Corporate Citizenship* (AICC), *Business for Social Responsibility* (BSR) di USA, *Business in the Community* (BiTC) di UK, dan *International Organization for Standardization* (ISO) yang dikeluarkan ISO 26000 sebagai standar internasional yang menyediakan pedoman tanggung jawab sosial untuk perusahaan publik dan swasta (Habbash, 2015).

Pengungkapan CSR banyak dipengaruhi banyak faktor salah satunya *Good Corporate Governance* (GCG). Konsep GCG mulai dikenal di Indonesia sejak krisis ekonomi tahun 1997 krisis berkepanjangan yang dinilai karena tidak dikelolanya perusahaan-perusahaan secara bertanggungjawab, serta mengabaikan regulasi dan sarat dengan praktek KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Pada saat itulah GCG mencuat sebagai bentuk kontribusi pemerintah dalam upaya memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Prabudi dan Suana (2015) pemerintah Indonesia menandatangani Nota Kesepakatan (*Letter of Intent*) dengan *International Monetary Fund* (IMF) yang mendorong terciptanya iklim yang lebih kondusif bagi penerapan GCG. Pemerintah Indonesia mendirikan lembaga khusus, yaitu Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) dan direvisi menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang memiliki tugas pokok dalam merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional mengenai GCG, serta memprakarsai dan memantau perbaikan di bidang *corporate governance* di Indonesia. Kerangka kerja tata kelola perusahaan di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan (KNKG, 2006). Seiring berjalannya waktu GCG telah berperan dalam tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan, seperti yang diungkapkan Habbash (2015) mengungkapkan bahwa GCG telah berevolusi sebagai sarana yang mengakomodasi hal yang dulunya tidak dianggap perlu yaitu hubungan bisnis-lingkungan dan hubungan bisnis-masyarakat.

Penelitian sebelumnya yang menguji hubungan antara *Good Corporate Governance* dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* telah dilakukan oleh Said dkk. (2009), Oh dkk. (2011), Esa dkk. (2012), Jizi dkk. (2014), dan Habbash (2015). Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu antara lain adalah Ukuran Komite Audit, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Dualitas Peran, Komposisi Kepemilikan Pemerintah, Komposisi Kepemilikan Institusi, Komposisi Kepemilikan Keluarga dan Komposisi Kepemilikan Asing. Beberapa variabel yang digunakan sebelumnya untuk meneliti pengaruh *corporate governance* terhadap *corporate social responsibility* menunjukkan hasil yang berbeda. Misalnya, penelitian yang dilakukan Jizi dkk. (2014) menunjukkan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan CSR, sedangkan penelitian yang dilakukan Habbash (2015) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan CSR. Penelitian yang dilakukan oleh Said dkk. (2009) menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan CSR, sedangkan penelitian yang dilakukan Oh dkk. (2011) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan CSR. Perbedaan hasil penelitian dikarenakan perbedaan sampel dan pedoman penelitian.

Habbash (2015) meneliti pengaruh komite audit, dewan independen, CEO *duality*, kepemilikan pemerintah, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusi terhadap CSR dengan sampel 267 perusahaan *go public non financial* pada tahun 2007-2011 di negara Saudi Arabia. Hasil penelitian Habsah (2015) menunjukkan

bahwa variabel kepemilikan pemerintah dan kepemilikan keluarga berpengaruh positif, sedangkan variabel komite audit, komisaris independen, *role duality* dan kepemilikan institusi tidak berpengaruh. Penelitian ini serupa dengan penelitian Habbash (2015) dengan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013 dan 2014. Penulis mengambil sampel perusahaan pertambangan karena dari berbagai macam sektor perusahaan, perusahaan pertambangan adalah yang dirasa oleh penulis paling cocok untuk diteliti pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Pada perusahaan pertambangan, kegiatan produksinya banyak menimbulkan dampak negatif untuk lingkungan sekitar, seperti pembukaan lahan, pembuangan limbah seperti arsenik dan merkuri ke sungai, pengerukan sungai dan penggunaan bahan peledak. Karena alasan tersebut, maka penulis meyakini bahwa sudah seharusnya perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya bagi lingkungan sekitar.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini menggunakan pedoman CSR yang diterbitkan oleh GRI (2013) karena penelitian ini dilakukan di Indonesia sedangkan penelitian Habbash (2015) menggunakan pedoman *International Organization for Standardization* (ISO) yang dikeluarkan ISO 26000, disamping itu penulis tidak menggunakan variabel *CEO duality* (jabatan rangkap sebagai CEO dan *chairman* yang dipegang satu orang) dikarenakan Indonesia menggunakan *two-tiers board system* yaitu sistem dua tingkat yang berasal dari sistem hukum kontinental Eropa. Dalam sistem ini peran dewan komisaris dan dewan direksi dipisah secara jelas. Dewan direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan dewan komisaris, sedangkan

dewan komisaris bertugas mengawasi tugas-tugas dewan direksi. Negara-negara yang menggunakan *two-tiers system* adalah Belanda, Jerman, dan Indonesia (Aini, 2011).

Penulis menambahkan variabel independen kepemilikan asing dan kepemilikan publik dalam penelitian ini, karena dalam penelitian yang dilakukan oleh Rustiarini (2008) menemukan hasil bahwa kepemilikan saham asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian yang dilakukan Hadi dan Sabeni (2002) juga menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh signifikan terhadap pelaporan CSR tahunan oleh perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian Rahayu dan Anisyukurlillah (2015) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan CSR. Perusahaan yang sahamnya dikuasai publik lebih banyak menunjukkan bahwa para investor dari ranah publik telah memberikan banyak kepercayaan kepada perusahaan sehingga untuk menjaga kepercayaan tersebut, perusahaan akan semaksimal mungkin mengungkapkan segala kegiatan yang ada di perusahaannya. Salah satu pengungkapan tersebut adalah kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa tingkat pengungkapan CSR di Indonesia masih rendah, dan karena adanya ketidak konsistenan hasil, maka dari itu penulis bermaksud menyusun penelitian dengan judul **“PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN KEPEMILIKAN SAHAM PUBLIK TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Tingkat Pengungkapan CSR di Indonesia yang masih relatif rendah meskipun telah ada undang-undang yang mewajibkan pengungkapan CSR.
2. Ketidakkonsistenan hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh variabel yang mewakili GCG seperti Komposisi Dewan Komisaris Independen dan Komposisi Kepemilikan Asing terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR adalah GCG dan kepemilikan saham publik. Karena itu peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh GCG dan kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan CSR.

C. Pembatasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Hanya membahas seberapa besar pengaruh GCG dan Kepemilikan Saham Publik terhadap pengungkapan CSR.

2. Variabel yang mewakili GCG dalam penelitian ini adalah Ukuran Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Asing.
3. Sampel dalam penelitian ini hanya perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2014.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah Ukuran Komite Audit mempengaruhi Tingkat Pengungkapan CSR?
2. Apakah Komposisi Dewan Komisaris Independen mempengaruhi Tingkat Pengungkapan CSR?
3. Apakah Komposisi Kepemilikan Saham Institusional mempengaruhi Tingkat Pengungkapan CSR?
4. Apakah Komposisi Kepemilikan Saham Asing mempengaruhi Tingkat Pengungkapan CSR?
5. Apakah Komposisi Kepemilikan Saham Publik mempengaruhi Tingkat Pengungkapan CSR?
6. Apakah Ukuran Komite Audit, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Komposisi Kepemilikan Institusi, Komposisi Kepemilikan Asing, dan

Komposisi Kepemilikan Publik mempengaruhi Tingkat Pengungkapan CSR?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Tingkat Pengungkapan CSR
2. Untuk mengetahui pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Tingkat Pengungkapan CSR
3. Untuk mengetahui pengaruh Komposisi Kepemilikan Saham Institusional terhadap Tingkat Pengungkapan CSR.
4. Untuk mengetahui pengaruh Komposisi Kepemilikan Saham Asing terhadap Tingkat Pengungkapan CSR.
5. Untuk mengetahui pengaruh Komposisi Kepemilikan Saham Publik terhadap Tingkat Pengungkapan CSR.
6. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Komite Audit, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Komposisi Kepemilikan Institusi, Komposisi Kepemilikan Asing, dan Komposisi Kepemilikan Publik terhadap Tingkat Pengungkapan CSR.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak akademis, memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu Akuntansi terutama mengenai bagaimana tata kelola perusahaan dapat mempengaruhi pelaporan CSR dalam laporan tahunan perusahaan.
2. Bagi penulis, penelitian ini diharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memotivasi peneliti untuk memahami secara mendalam tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi CSR.
3. Bagi masyarakat, diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengawasi kegiatan operasi perusahaan yang berpengaruh terhadap lingkungan dan sosial.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Legitimasi

Gray dkk. (1995) dalam Nor Hadi (2011:88) berpendapat bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat, operasi perusahaan harus sejalan dengan harapan masyarakat. Ini sesuai dengan pernyataan Jaffar dkk. (2010) yang mengatakan perusahaan perlu memastikan bahwa aktivitas perusahaan selaras dengan kehendak masyarakat atau kehendak pemegang saham untuk memastikan perusahaan dapat terus beroperasi dengan baik. Pengertian teori Legitimasi dapat dipahami dari pernyataan Lindblom (1994) dalam Sinaga (2011) sebagai berikut:

“.....a condition or status which exists when an entity's value system is congruent with the value system of the larger social system of which the entity is a part. When a disparity, actual or potential, exists between the two value systems, there is a threat to the entities legitimacy”.

Arti dari pernyataan tersebut adalah legitimasi merupakan suatu kondisi atau status yang terjadi ketika suatu sistem nilai sebuah entitas sejalan dengan nilai dari sistem sosial yang lebih besar dimana entitas tersebut berada. Saat terjadi perbedaan secara

aktual ataupun potensial antara kedua sistem nilai tersebut, maka ada ancaman terhadap legitimasi entitas tersebut.

O'Donovan, (2001) dalam Nor Hadi (2011:87) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumberdaya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*). Deegan dkk. (2000) dalam Trong Tuan (2012) menyatakan legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai dengan eksistensi sistem nilai yang ada di masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam.

Perusahaan melakukan aktivitas CSR dengan tujuan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat, yang artinya perusahaan mengharapkan masyarakat mendukung aktivitas perusahaan tersebut. Dengan dukungan dari masyarakat, keberlangsungan hidup perusahaan terjamin sehingga investor merasa aman menanamkan modal di perusahaan tersebut. Selain itu perusahaan juga dapat menarik minat investor lainnya untuk menanamkan modalnya karena keberlangsungan hidup perusahaan terjamin.

2. Teori Agensi

Teori Agensi memprediksi bahwa masalah agen-prinsipal antara manajer dengan *shareholders* terjadi ketika manajer mempunyai hak atas sebagian ekuitas dalam perusahaan. Hal ini akan berimbas pada peningkatan perilaku oportunistik (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut Anthony dan Govindarajan (2011) menyatakan bahwa hubungan agensi merupakan hubungan kontrak antara prinsipal dan agen. Teori Agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal dalam hal ini adalah pemegang saham mendelegasikan pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan atau tugas tertentu kepada agen (manajer) sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan pemegang saham. Oleh karena itu, manajer berkewajiban memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya melalui pengungkapan informasi seperti laporan keuangan.

Dalam hubungan agensi terdapat tiga masalah utama (Aryanti, 2013), yang pertama masalah pengendalian yang dilakukan oleh prinsipal terhadap agen. Masalah pengendalian tersebut meliputi beberapa masalah pokok yaitu tindakan agen yang tidak bisa diamati oleh prinsipal dan mekanisme pengendalian tersebut. Tanpa memantau kegiatan agen, hanya agen yang mengetahui persis apakah agen bekerja

atas kepentingan terbaik prinsipal. Disamping itu, hanya agen yang lebih mengetahui banyak tentang tugas agen dibandingkan prinsipal. Adanya tindakan agen yang tidak diketahui secara pasti oleh prinsipal, memaksa prinsipal melakukan mekanisme pengendalian agar kepentingan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan yaitu melalui pengawasan dan kontak insentif.

Kedua adalah masalah biaya yang menyertai hubungan agensi. Munculnya perbedaan diantara prinsipal dan agen menyebabkan munculnya biaya tambahan sebagai biaya agensi. Sebagai contoh biaya yang termasuk biaya agensi yaitu biaya kompensasi insentif yang berupa bonus dalam bentuk opsi saham, biaya *monitoring* (biaya audit) dan biaya kesempatan (*opportunity cost*) yang muncul karena kesulitan perusahaan besar untuk merespon kesempatan baru sehingga kehilangan peluang untuk memperoleh keuntungan.

Masalah ketiga adalah bagaimana menghindari dan meminimalisir biaya agensi. Prinsipal memiliki kepentingan untuk memperkecil biaya agensi yang muncul. Usaha yang dapat dilakukan oleh prinsipal untuk memperkecil biaya agensi karena tidak dapat dihilangkan sama sekali adalah dengan mencari manajer yang benar-benar dapat dipercaya dan mengetahui secara jelas kapabilitas dan personalitas. Selain itu juga memperjelas kontrak insentif dengan seksama kompensasi opsional sehingga memotivasi agen untuk bekerja sesuai kepentingan prinsipal dengan penghargaan yang wajar terhadap prinsipal.

Seperti disebutkan di atas, teori Agensi memprediksi bahwa masalah agen-prinsipal antara manajer dengan shareholders yang terjadi ketika manajer mempunyai hak atas sebagian ekuitas dalam perusahaan yang akan berimbas pada peningkatan perilaku oportunistik (Jensen dan Meckling, 1976). Maka dari itu dibutuhkan tata kelola yang baik untuk mencapai keselarasan tujuan antara manajemen dan pemegang saham.

3. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

a. Pengertian dan Konsep CSR

Menurut Bhattacharya dkk. (2009) mengungkapkan CSR merupakan sebuah konsep tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat dan *stakeholder* lainnya. CSR saat ini menjadi elemen penting dari dialog antara perusahaan dan *stakeholders* mereka dan terus menuai perhatian atas agenda korporasi. Secara teoretik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para *stakeholder*-nya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya.

Indikator yang digunakan untuk pengungkapan CSR dalam penelitian ini berjumlah 91 indikator pengungkapan, sesuai dengan pedoman pengungkapan menurut GRI (2013), 91 indikator tersebut adalah :

Tabel 1. Indikator Pengungkapan CSR Menurut GRI

INDEX CSR	
EKONOMI	
EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim
EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti
EC4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan
EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang di berikan
EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
EC9	Perbandingan pembelian dari pemasok lokal di lokasi operasional yang signifikan

LINGKUNGAN	
EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume
EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
EN3	Konsumsi energi dalam organisasi
EN4	Konsumsi energi diluar organisasi
EN5	Intensitas energi
EN6	Pengurangan konsumsi energi
EN7	Pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa
EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
EN10	Persentase dan total volume air yang di daur ulang dan digunakan kembali
EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di dalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman tinggi di luar kawasan lindung

EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
EN14	Jumlah total spesies dalam IUCN RED LIST dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan
EN15	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) langsung (Cakupan 1)
EN16	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2)
EN17	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3)
EN18	Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
EN19	Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
EN20	Emisi Bahan Perusak Ozon (BPO)
EN21	NO _x , SO _x , dan emisi udara signifikan lainnya
EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
EN24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan
EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi BASEL ² lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari air buangan dan limpasan dari organisasi
EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa
EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang di reklamasi menurut kategori
EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan
EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja
EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi

SOSIAL

PRAKTIK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA

LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover
------------	--

	karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah
LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan
LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut gender
LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama
LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender
LA7	Pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
LA8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
LA9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan
LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
LA11	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan
LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya
LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan
LA15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
HAK ASASI MANUSIA	
HR1	Jumlah total dan persentase yang signifikan yang menyertakan klausul

	terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih
HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang diambil
HR4	Operasi dan pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut
HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif
HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
HR7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi
HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
HR9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia
HR10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia
HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
MASYARAKAT	
SO1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembang yang diterapkan
SO2	Operasi dengan dampak negatif yang aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi
SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/ penerima manfaat

SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya
SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhana terhadap undang-undang dan peraturan
SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria dampak terhadap masyarakat
SO10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikna melalui mekanisme pengaduan resmi
TANGGUNG JAWAB ATAS PRODUK	
PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan yang dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarelaterkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil
PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis
PR4	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil
PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan
PR7	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil
PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkaitpenyediaan dan penggunaan produk dan jasa

Sumber : *www.globalreporting.org*

Dalam pedoman tersebut dijelaskan Indikator memberikan informasi tentang kinerja atau dampak di bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial dari suatu organisasi

terkait dengan aspek materialnya. Aspek material adalah aspek yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dari organisasi tersebut; atau secara substantif memengaruhi asesmen dan keputusan pemangku kepentingan.

b. Pengungkapan CSR

Pengungkapan terhadap aspek *social*, *ethical*, *environmental* dan *sustainability* merupakan suatu cara bagi perusahaan untuk menyampaikan bentuk akuntabilitasnya kepada para *stakeholders*. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dilakukan untuk melindungi hak pemegang saham yang cenderung terabaikan akibat terpisahnya pihak manajemen yang mengelola perusahaan dan pemegang saham yang memiliki modal. Informasi yang akan diungkapkan dalam laporan keuangan tentunya harus disesuaikan dengan kepentingan pengguna laporan keuangan. Diharapkan dengan semakin transparan informasi yang disajikan oleh suatu perusahaan ditambah dengan semakin nyatanya penerapan tata kelola yang baik akan meningkatkan keberhasilan bisnis dalam dunia usaha secara berkesinambungan, juga dapat digunakan untuk memahami bisnis pada suatu perusahaan (Murwaningsari dan Pradhana, 2014).

Di Indonesia praktik pengungkapan tanggung jawab sosial diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Paragraf 9, yang menyatakan menyatakan bahwa selain laporan keuangan, perusahaan dapat menyajikan laporan tambahan mengenai lingkungan hidup. Selain itu, pengungkapan tanggung jawab sosial juga terdapat

dalam keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. kep-38/PM/1996 peraturan No. VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan yang berisi mengenai kebebasan bagi perusahaan untuk memberikan penjelasan umum (seperti kegiatan bakti sosial dan amal) mengenai perusahaan, selama hal tersebut tidak menyesatkan dan bertentangan dengan informasi yang disajikan dalam bagian lainnya (Murwaningsari, 2009).

c. Manfaat Penerapan CSR

CSR merupakan salah satu aktivitas pertanggung jawaban yang bila dilakukan dengan sebagaimana mestinya pasti menimbulkan manfaat yang besar terutama bagi perusahaan yang melakukannya. Manurung (2012) mengungkapkan bahwa CSR dapat dipandang sebagai aset strategis dan kompetitif bagi perusahaan di tengah iklim bisnis yang makin sarat kompetisi. CSR dapat memberi banyak keuntungan yaitu:

1. Peningkatan profitabilitas bagi perusahaan dan kinerja finansial yang lebih baik. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang mengimplementasikan program CSR menunjukkan keuntungan yang nyata terhadap peningkatan nilai saham. Pengungkapan informasi CSR ini diharapkan dapat mempengaruhi harga saham perusahaan di pasar modal. Pengungkapan CSR dipandang sebagai suatu indikasi adanya manajemen yang baik dan karenanya perusahaan tersebut merupakan target investasi yang baik.

2. Menurunkan risiko benturan dengan masyarakat sekitar, karena sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri di sebuah kawasan dengan jalan membangun kerjasama antara *stakeholder* yang di fasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitar atau dalam pengertian kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan *stakeholder* yang terkait.
3. Pembangunan citra perusahaan, karena dengan pelaksanaan CSR yang baik, mana perusahaan akan memperoleh citra yang baik yang dapat mempengaruhi pandangan pihak luar terhadap suatu perusahaan. Perusahaan juga memperoleh pengakuan dari pihak-pihak lain atas performa CSR-nya sehingga akan membangun suatu citra sebagai perusahaan yang peduli bukan hanya keuntungan melainkan juga memperhatikan keadaan sosial dan lingkungan di sekitarnya.
4. Mampu meningkatkan reputasi perusahaan yang dapat di pandang sebagai pemasaran sosial bagi perusahaan tersebut yang juga merupakan bagian dari pembagunan citra perusahaan. Pemasaran sosial akan dapat memberikan manfaat dalam pembentukan *brand image* suatu perusahaan dalam kaitannya dengan kemampuan perusahaan terhadap komitmen yang tinggi terhadap lingkungan selain memiliki produk yang berkualitas

tinggi. Hal itu tentu saja akan memberikan dampak positif terhadap volume unit produksi yang terserap pasar yang akhirnya akan mendatangkan keuntungan yang berpengaruh pada laba perusahaan.

d. Implementasi CSR di Indonesia

Kewajiban pengungkapan CSR di Indonesia telah diatur dalam beberapa regulasi, antara lain adalah pernyataan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyarankan perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab mengenai sosial dan lingkungan sebagaimana dituangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 1998) Paragraf kesembilan yang berbunyi :

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*added value statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.”

Standar pengungkapan CSR yang berkembang di Indonesia merujuk standar yang dikembangkan oleh GRI (*Global Reporting Initiatives*). Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Manajemen (IAI-KAM) atau sekarang dikenal Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) merujuk standar yang dikembangkan oleh GRI dalam pemberian penghargaan Indonesia *Sustainability Report Award* (ISRA) kepada perusahaan-perusahaan yang ikut serta dalam membuat laporan keberlanjutan atau *sustainability report*. Standar GRI dipilih karena memfokuskan pada standar pengungkapan berbagai kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan

perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, dan pemanfaatan *sustainability reporting* (Sinaga, 2011).

e. CSR dan Perusahaan Pertambangan di Indonesia

Kegiatan CSR merupakan sebuah kebutuhan dan keharusan bagi perusahaan pertambangan agar mendapat dukungan dari masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi pertambangan. Hal ini sejalan dengan teori Legitimasi dimana perusahaan melakukan aktivitas CSR dengan tujuan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat, yang artinya perusahaan mengharapkan masyarakat mendukung aktivitas perusahaan tersebut. Dengan dukungan dari masyarakat, keberlangsungan hidup perusahaan terjamin sehingga investor merasa aman menanamkan modal di perusahaan tersebut.

Perusahaan pertambangan dalam kegiatan produksinya banyak berdampak negatif pada lingkungan. Sudah banyak kasus yang terjadi yang merupakan akibat dari kegiatan pertambangan, seperti yang terjadi pada tahun 2006 yaitu banjir lumpur panas Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Semburan lumpur panas ini menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya, serta memengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Selain itu pada tahun 2013, terowongan PT Freeport Indonesia di Big Gossan, Tembagapura, Papua runtuh, korban dari kecelakaan ini mencapai 21 orang.

Dari contoh kasus di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan dari perusahaan pertambangan menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, sudah seharusnya perusahaan pertambangan meningkatkan kegiatan CSR sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

4. *Good Corporate Governance (GCG)*

World Bank Group (2007) mendefinisikan GCG adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FGCI, 2000) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional. Namun, walau menyadari pentingnya GCG, banyak pihak yang melaporkan masih rendahnya perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut. Masih banyak perusahaan menerapkan prinsip GCG

karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada dibandingkan yang menganggap prinsip tersebut sebagai bagian dari kultur perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Menurut KNKG (2006), 5 asas yang perlu dalam penerapan GCG adalah :

1. Transparansi

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesenjangan

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

a. Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit adalah jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Said dkk. (2009) menyatakan bahwa tanggung jawab komite audit meliputi *review* departemen audit internal, mengulas rencana audit tahunan, meninjau laporan keuangan triwulan dan akhir tahun, berfokus pada perubahan kebijakan dan praktik akuntansi, penyesuaian signifikan yang timbul dari audit, asumsi

kelangsungan perusahaan, kesesuaian dengan standar akuntansi dan peraturan hukum lainnya membuat pengawasan komite audit terhadap aktivitas perusahaan sangat ketat termasuk aktivitas CSR dan pengungkapannya. Ukuran Komite Audit diukur dengan menghitung jumlah anggota Komite Audit dalam laporan tahunan perusahaan yang tercantum pada laporan tata kelola perusahaan (Sinaga, 2011).

Komite audit dapat disebut sebagai mekanisme GCG diukur dari tugas dan tanggung jawab. Berikut tugas dan tanggung jawab komite audit (Surya dan Yustivandana, 2006:149):

1. Mendorong terbentuknya struktur pengawasan intern yang memadai. Adanya pengawasan intern ditujukan untuk mewujudkan prinsip pertanggungjawaban agar organ-organ perusahaan melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya berdasarkan aturan yang ada.
2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan. Prinsip transparansi dikembangkan dalam tugas ini.
3. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan eksternal audit kewajaran biaya eksternal audit, serta kemandirian dan objektivitas eksternal auditor. Komite audit dalam hal ini menjalankan prinsip akuntabilitas.
4. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit. Hal ini terkait dengan prinsip pertanggungjawaban.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa komite audit sudah memenuhi syarat sebagai mekanisme GCG karena memenuhi asas-asas GCG seperti pertanggungjawaban, transparansi, akuntabilitas.

b. Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan (Surya dan Yustivandana, 2006:135). Kriteria dewan komisaris independen menurut FCGI (2001) sebagai berikut:

1. Komisaris Independen bukan merupakan anggota manajemen;
2. Komisaris Independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan;
3. Komisaris Independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu;

4. Komisaris Independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut;
5. Komisaris Independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut;
6. Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut;
7. Komisaris Independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.

Dari penjelasan kriteria komisaris independen di atas, dapat dilihat bahwa kriteria komisaris independen dapat mendukung aktivitas perusahaan untuk berjalan lebih baik, mengontrol kecurangan di setiap aktivitas perusahaan dengan tujuan menciptakan keseimbangan kepentingan berbagai pihak (Surya dan Yustivandana,

2006:139). Dengan kata lain komisaris independen dapat mempengaruhi aktivitas CSR dan pengungkapannya karena aktivitas CSR otomatis terpantau oleh komisaris independen, karena komisaris independen berpegang pada prinsip keseimbangan kepentingan berbagai pihak maka komisaris independen ingin memaksimalkan hasil dari kegiatan CSR agar memberikan kepuasan kepada pihak yang berkepentingan terhadap CSR. Komposisi Dewan Komisaris Independen diukur dengan menggunakan skala rasio, yaitu dengan rasio atau persentase jumlah anggota dewan komisaris independen dengan jumlah total anggota dewan komisaris (Cahyowati dan Aini, 2011).

c. **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Susanti dan Riharjo, 2013). Kepemilikan oleh institusi dapat meningkatkan pengendalian terhadap manajemen dan mengurangi peluang tindak kecurangan yang mungkin dilakukan (Murwaningsari, 2009). Institusi secara profesional akan memantau perkembangan investasinya agar dapat menghasilkan keuntungan yang ingin mereka capai. Pengawasan yang dilakukan oleh institusi inilah yang akan menekan manajemen agar tidak bertindak menyimpang dan membuat meningkatnya kinerja di setiap aktivitas perusahaan termasuk CSR dan pengungkapannya. Dengan diberikannya tekanan kepada manajer maka akan meminimalisir *agency problem* yang dijelaskan didalam teori Agensi.

Komposisi Kepemilikan Institusi diukur dengan menggunakan skala rasio, yaitu dengan rasio atau persentase jumlah saham institusi dengan jumlah saham yang beredar (Farooque dkk., 2007). Menurut Murwaningsari (2009), investor institusional memiliki kekuatan dan pengalaman untuk bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham, sehingga mereka menuntut perusahaan untuk melakukan komunikasi secara transparan. Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa kepemilikan institusional sudah memenuhi syarat sebagai mekanisme GCG karena memenuhi asas-asas GCG yaitu transparansi.

d. Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan multinasional. Komposisi Kepemilikan Asing ini diukur dengan menggunakan skala rasio, yaitu dengan rasio atau persentase jumlah saham asing dengan jumlah saham yang beredar (Farooque dkk., 2007). Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap penting terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Hal ini kemungkinan dikarenakan perusahaan asing mendapat pelatihan yang lebih baik dalam bidang akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri, perusahaan asing mungkin memiliki sistem informasi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal dan perusahaan induk serta kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing dari pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum (Susanti dan Riharjo, 2013). Sebagai pihak yang

concern terhadap aktivitas perusahaan berarti pemilik asing bertanggung jawab atas perusahaan dimana dia memiliki saham disana. Sikap tanggung jawabnya menunjukkan bahwa kepemilikan asing telah memiliki salah satu asas mekanisme GCG.

Keahlian dalam sistem informasi dan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi mengindikasikan kepemilikan asing akan mengurangi *agency cost* yang dijelaskan dalam teori Agensi dikarenakan pemilik asing sebagai prinsipal bisa lebih bijaksana dalam menyatukan tujuannya dengan agen (manajer) dalam setiap aktivitas perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan salah satu media yang dipilih untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya. Sehingga perusahaan dengan kepemilikan saham asing yang besar akan terdorong untuk melaporkan atau mengungkapkan informasinya secara sukarela dan lebih luas (Alfia, 2013). Menurut Haniffa dan Cooke (2005) menyatakan bahwa pemilik asing menggunakan pengungkapan sosial perusahaan sebagai strategi legitimasi proaktif untuk mempertahankan pemasukan dari modal serta sebagai permohonan etik investor.

e. Manfaat dan penerapan GCG

Manfaat GCG ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus pilar pemenang era persaingan global. Selain itu, menurut FCGI (2001)

pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat berikut ini :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan nilai perusahaan.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

FCGI (2001) menyatakan bahwa pelaksanaan GCG dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional, yaitu: (1) Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan, (2) Perlakuan sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam, (3) Peranan pemegang saham harus diakui

sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan (4) Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*), (5) Tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Variabel-variabel yang mewakili GCG dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruhnya terhadap CSR adalah Ukuran Komite Audit, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Komposisi Kepemilikan Institusional dan Komposisi Kepemilikan Asing.

5. Kepemilikan Publik

Kepemilikan saham publik adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik/masyarakat terhadap saham perusahaan. Publik sendiri adalah individu atau institusi yang memiliki kepemilikan saham di bawah 5% yang berada di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan (Puspitasari, 2009). Menurut Adnantara (2013) pemegang saham publik dalam berinvestasi lebih memilih membeli saham pada perusahaan-perusahaan yang melakukan CSR, karena perusahaan tersebut sangat memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaannya guna mengurangi kritikan dan komplain dari masyarakat (melalui media massa). Perusahaan yang kepemilikan saham publiknya tinggi menunjukkan bahwa

perusahaan dianggap mampu beroperasi dan memberikan deviden yang sesuai kepada masyarakat sehingga cenderung akan mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas (Rahayu dan Anisyukurlillah, 2015). Besarnya saham publik diukur menggunakan rasio dari jumlah kepemilikan lembar saham yang dimiliki publik terhadap total saham beredar (Puspitasari, 2009).

Informasi keuangan yang disampaikan manajemen, oleh para investor digunakan untuk menganalisis kinerja manajemen dan kondisi perusahaan di masa yang akan datang guna mengurangi risiko investasi. Agar publik mau melakukan investasi pada perusahaan dan percaya terhadap rendahnya risiko investasi, maka perusahaan harus menampilkan keunggulan dan eksistensi perusahaan terhadap publik. Salah satu caranya adalah mengungkapkan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Semakin besar komposisi saham perusahaan yang dimiliki publik, maka dapat memicu melakukan pengungkapan secara luas termasuk pengungkapan CSR. Berdasarkan hasil penelitian Rahayu dan Anisyukurlillah (2015) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan CSR. Perusahaan yang sahamnya dikuasai publik lebih banyak menunjukkan bahwa para investor dari ranah publik telah memberikan banyak kepercayaan kepada perusahaan sehingga untuk menjaga kepercayaan tersebut, perusahaan akan semaksimal mungkin mengungkapkan segala kegiatan yang ada di perusahaannya. Salah satu pengungkapan tersebut adalah kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan Hadi dan Sabeni (2002), Puspitasari (2009) juga menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh signifikan terhadap pelaporan CSR tahunan oleh perusahaan. Hal tersebut dikaitkan dengan tekanan dari pemegang saham, agar perusahaan lebih memperhatikan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat. Indraswari dan Astika (2015) menyatakan bahwa praktik pengungkapan tanggung jawab sosial memegang peranan yang penting untuk perusahaan karena perusahaan hidup di lingkungan masyarakat dan tak jarang aktivitasnya memiliki dampak sosial dan lingkungan. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan. Selain itu, pengungkapan tanggung jawab sosial dapat dipandang sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial yang ditimbulkan perusahaan.

B. Penelitian Relevan

Penelitian yang menjelaskan tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap Tingkat Pengungkapan CSR sudah banyak dilakukan di berbagai negara. Dalam penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang bervariasi di setiap penelitian yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan Said dkk. (2009) mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan menggunakan sampel di negara Malaysia. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian Said dkk. (2009) adalah ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen *non-executive*,

dualitas CEO, komite audit, kepemilikan manajerial, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan asing dan kepemilikan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris independen *non-executive* dan kepemilikan pemerintah berpengaruh positif dan ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, dualitas CEO, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing tidak berpengaruh.

Penelitian yang dilakukan Oh dkk. (2011) mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap CSR menggunakan sampel di negara Korea. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian Oh dkk. (2011) adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan asing berpengaruh positif dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif.

Penelitian yang dilakukan Esa dkk. (2012) mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *corporate social responsibility* menggunakan sampel di negara Malaysia. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian Esa dkk. (2012) adalah ukuran dewan komisaris, *independent directors*, ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris, *leverage* berpengaruh positif, variabel *independent directors* berpengaruh negatif dan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas tidak berpengaruh.

Penelitian yang dilakukan Jizi dkk. (2014) mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *corporate social responsibility* menggunakan sampel di negara

Amerika. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian Jizi dkk. (2014) adalah dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan dualitas CEO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel diatas berpengaruh positif.

Penelitian yang dilakukan Habbash (2015) mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *corporate social responsibility* menggunakan sampel di negara Arab Saudi. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian Habbash (2015) adalah komite audit, dewan komisaris independen, dualitas CEO, kepemilikan pemerintah, kepemilikan keluarga dan kepemilikan institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan pemerintah dan kepemilikan keluarga berpengaruh positif, sedangkan variabel komite audit, dewan komisaris independen, dualitas CEO dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh.

C. Kerangka Berpikir

1. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Tingkat Pengungkapan CSR

Menurut FCGI (2001) menyatakan bahwa komite audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan manajemen dalam melakukan tugas operasional perusahaan, dan harus memiliki pengalaman dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Menurut Habbash (2015) komite audit yang efektif bisa menjadi alat pengawasan yang sukses untuk keputusan manajer, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial bisnis, yang akan

tercermin dalam pengungkapan CSR berkualitas tinggi. Dengan penjelasan diatas maka menunjukkan bahwa komite audit dapat meminimalisir *agency problem* dan menekan *agent* (direksi) bertindak secara rasional untuk kepentingan prinsipalnya (pemegang saham). Penelitian sebelumnya oleh Hapsoro (2012) menemukan adanya pengaruh positif antara Ukuran Komite Audit dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Semakin besar Ukuran Komite Audit maka semakin tinggi pengawasan atas aktivitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Tingkat Pengungkapan CSR

Komisaris Independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Sikap independensi dari pihak luar serta memiliki tujuan untuk kepentingan perusahaan menjadikan keberadaan dewan komisaris independen sangatlah penting bagi kelangsungan perusahaan. Keberadaan dewan komisaris independen akan semakin menambah efektifitas pengawasan. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat ketentuan yang mengatur tentang keberadaan dewan komisaris independen. Ketentuan yang dimaksud adalah peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-A tanggal 14 Juli tahun 2004.

Kriteria komisaris independen dapat mendukung aktivitas perusahaan untuk berjalan lebih baik, mengontrol kecurangan di setiap aktivitas perusahaan dengan

tujuan menciptakan keseimbangan kepentingan berbagai pihak (Surya dan Yustivandana, 2006:139). Dengan kata lain komisaris independen dapat mempengaruhi aktivitas CSR dan pengungkapannya karena aktivitas CSR otomatis terpantau oleh komisaris independen, karena komisaris independen berpegang pada prinsip keseimbangan kepentingan berbagai pihak maka komisaris independen ingin memaksimalkan hasil dari kegiatan CSR agar memberikan kepuasan kepada pihak yang berkepentingan terhadap CSR. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jizi, dkk (2014) menemukan adanya pengaruh positif antara komposisi dewan komisaris independen dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

3. Pengaruh Komposisi Kepemilikan Institusional terhadap Tingkat Pengungkapan CSR

Shleifer dan Vishny (1997) mengemukakan bahwa pemilik institusional yang berpengaruh dalam keputusan organisasi dengan berpegang pada substansial hak suara serta memiliki asimetris informasi keunggulan dibandingkan pemegang saham lainnya. Keaktifan pemegang saham institusional dalam mengambil keputusan membuat mereka lebih *protective* dengan segala kegiatan perusahaan dengan tujuan agar keputusan yang mereka ambil lebih akurat. Kepemilikan oleh institusi dapat meningkatkan pengendalian terhadap manajemen dan mengurangi peluang tindak kecurangan yang mungkin dilakukan (Murwaningsari, 2009). Institusi secara profesional akan memantau perkembangan investasinya agar dapat menghasilkan keuntungan yang ingin mereka capai.

Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan Oh dkk. (2011) menemukan hasil ada pengaruh positif antara Komposisi Kepemilikan Institusional terhadap Tingkat Pengungkapan *corporate social responsibility*.

4. Pengaruh Komposisi Kepemilikan Asing terhadap Tingkat Pengungkapan CSR

Perusahaan dengan kepemilikan asing utamanya melihat keuntungan legitimasi yang berasal dari para *stakeholder* nya yang biasanya berdasarkan atas *home market* (pasar tempat beroperasi) sehingga dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang (Rustiarini, 2011). Pengungkapan tanggungjawab sosial ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan pada masyarakat sekitar. Pemegang saham asing berusaha mendapat legitimasi dari lingkungan sekitar dengan tujuan agar perusahaan tetap dapat eksis di lingkungan sekitar. Pemegang saham asing pasti mendapat intervensi lebih dari lingkungan sekitar karena mereka bukan dari kalangan negara tempat perusahaan berada. Sebagai pihak yang concern terhadap aktivitas perusahaan berarti pemilik asing bertanggungjawab atas perusahaan dimana dia memiliki saham disana. Sikap

tanggung jawabnya menunjukkan bahwa kepemilikan asing telah memiliki salah satu asas mekanisme GCG.

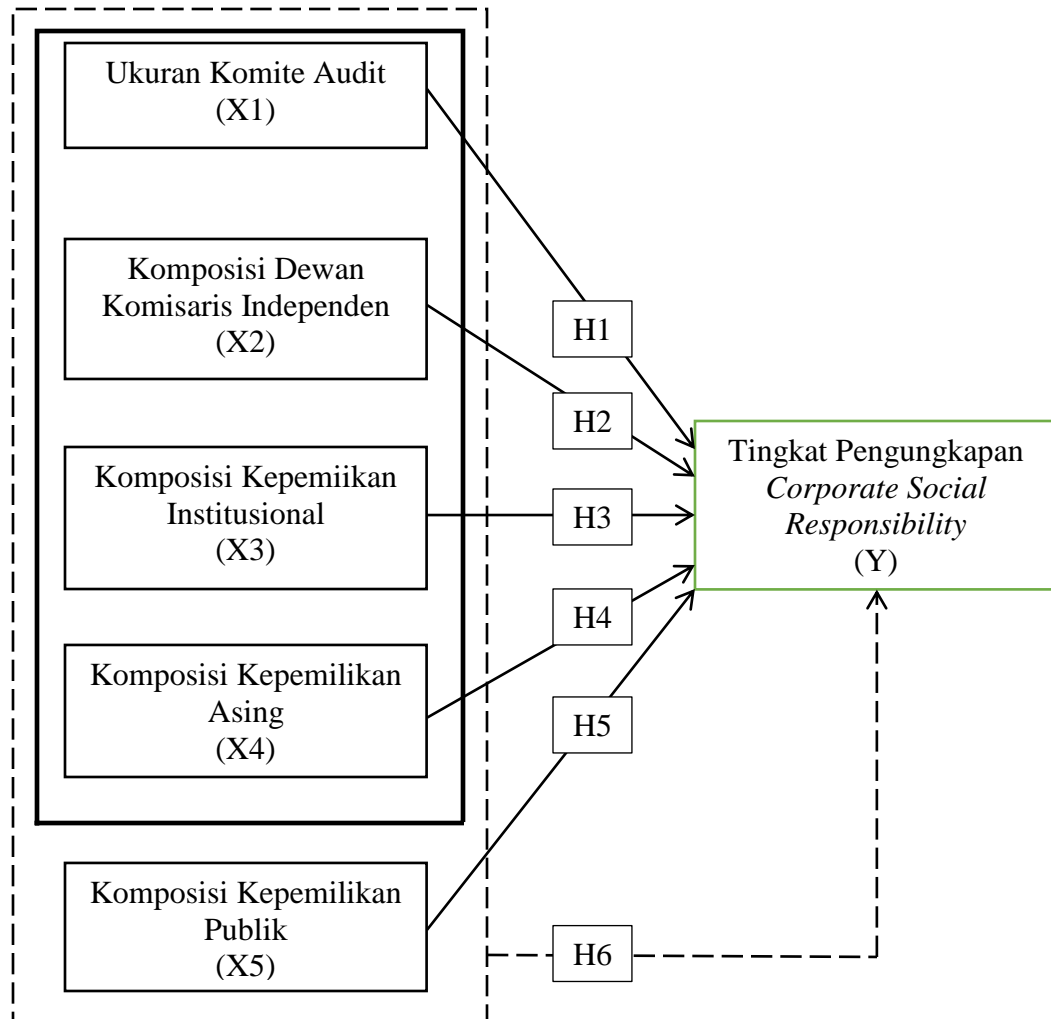
Keahlian dalam sistem informasi dan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi mengindikasikan kepemilikan asing akan mengurangi *agency cost* yang dijelaskan dalam teori Agensi dikarenakan pemilik asing sebagai prinsipal bisa lebih bijaksana dalam menyatukan tujuannya dengan agen (manajer) dalam setiap aktivitas perusahaan. Pengungkapan CSR merupakan salah satu media yang dipilih untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya. Penelitian yang dilakukan oleh Oh dkk. (2011) menemukan adanya pengaruh positif antara Komposisi Kepemilikan Asing dengan tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*.

5. Pengaruh Komposisi Kepemilikan Publik terhadap Tingkat Pengungkapan CSR

Kepemilikan saham publik adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik/masyarakat terhadap saham perusahaan. Publik sendiri adalah individu atau institusi yang memiliki kepemilikan saham di bawah 5% yang berada di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan (Putri, dalam Puspitasari, 2009). Kepemilikan saham publik juga dapat mempengaruhi Tingkat Pengungkapan CSR (Hadi dan Sabeni, 2002). Dengan adanya kepemilikan publik, maka perusahaan harus menyajikan laporan tahunan perusahaan kepada publik untuk menjaga kepercayaan investor publik terhadap perusahaan. Melalui laporan keuangan

perusahaan para investor akan menganalisis kinerja perusahaan dan kondisi perusahaan di masa yang akan datang untuk menjadi pertimbangan dalam investasinya. Agar investor mau melakukan investasi pada perusahaan, maka perusahaan harus menampilkan keunggulan perusahaan yang salah satu caranya adalah mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

D. Paradigma Penelitian



Gambar 1. Paradigma Penelitian

Keterangan :

————— : Variabel yang mewakili *Good Corporate Governance*

—————> : Pengaruh variabel X terhadap Y secara parsial

-----> : Pengaruh variabel X terhadap Y secara simultan

E. Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu :

- H1: Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
- H2: Komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
- H3: Komposisi Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
- H4: Komposisi Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
- H5: Komposisi Kepemilikan Publik berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
- H6: Ukuran Komite Audit, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Komposisi Kepemilikan Institusi, Komposisi Kepemilikan Asing, dan Komposisi Kepemilikan Publik berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal komparatif yang bertujuan untuk mencari hubungan sebab-akibat. Penelitian kausal komparatif merupakan tipe penelitian *ex post facto*, yaitu tipe penelitian terhadap data yang dikumpulkan setelah terjadinya suatu fakta atau peristiwa. Data yang digunakan dalam penelitian ini berjenis kuantitatif karena berbentuk angka-angka.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013 dan 2014. Data tersebut diakses dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu *www.idx.co.id* dan *Indonesian Capital Market Electronic Library* (ICaMEL) yaitu *www.icamel.id*. Waktu pengambilan data dilakukan pada bulan Februari 2016 dan penelitian dilakukan pada bulan Mei 2016 hingga selesai.

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Variabel Dependen

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan yang dinyatakan dalam *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI) yang mengacu pada indikator GRI (2013). Indikator GRI terdiri 7 fokus pengungkapan, yaitu *economic, environment, social, labour practices, human rights, society, dan product responsibility* sebagai dasar *sustainability reporting*. Dengan jumlah semua item yang mungkin diungkapkan, yang dinotasikan dalam rumus sebagai berikut:

$$CSRDI = \frac{n}{k}$$

keterangan:

CSRDI = indeks pengungkapan CSR

n = jumlah item pengungkapan yang dipenuhi

k = jumlah semua item yang mungkin dipenuhi

Pengukuran variabel ini dilakukan dengan cara mengamati ada atau tidaknya suatu item informasi yang ditentukan dalam laporan tahunan, apabila item informasi tidak ada dalam laporan keuangan maka diberi skor 0, dan jika item informasi yang

ditentukan ada dalam laporan keuangan tahunan maka diberi skor 1. Metode ini sering disebut *Checklist* data.

2. Variabel Independen

a. Ukuran Komite Audit

Ukuran Komite Audit merupakan jumlah anggota Komite Audit dalam suatu perusahaan. Skala pengukuran untuk variabel ini adalah skala nominal yaitu dengan menghitung jumlah anggota Komite Audit dalam laporan tahunan perusahaan yang tercantum pada laporan tata kelola perusahaan.

b. Komposisi Dewan Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. Variabel Komposisi Dewan Komisaris Independen ini diukur dengan menggunakan skala rasio, yaitu dengan rasio atau persentase jumlah anggota dewan komisaris independen dengan jumlah total anggota dewan komisaris

$$\text{Komposisi Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{anggota dewan komisaris independen}}{\text{anggota dewan komisaris}}$$

c. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusi adalah jumlah saham yang dimiliki institusi dalam suatu perusahaan. Variabel Komposisi Kepemilikan Institusi ini diukur dengan

menggunakan skala rasio, yaitu dengan rasio atau persentase jumlah saham institusi dengan jumlah saham yang beredar.

$$\text{Komposisi Kepemilikan Institusi} = \frac{\text{jumlah kepemilikan saham institusi}}{\text{jumlah saham beredar}}$$

Ket : Jumlah saham beredar dalam penelitian ini adalah jumlah saham beredar pada tahun 2013 dan 2014.

d. Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing adalah jumlah saham yang dimiliki asing dalam suatu perusahaan. Variabel Komposisi Kepemilikan Asing ini diukur dengan menggunakan skala rasio, yaitu dengan rasio atau persentase jumlah saham asing dengan jumlah saham yang beredar.

$$\text{Komposisi Kepemilikan Asing} = \frac{\text{jumlah kepemilikan saham asing}}{\text{jumlah saham beredar}}$$

Ket : Jumlah saham beredar dalam penelitian ini adalah jumlah saham beredar pada tahun 2013 dan 2014.

e. Kepemilikan Publik

Kepemilikan saham publik adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik/masyarakat terhadap saham perusahaan. Besarnya saham publik diukur menggunakan rasio dari jumlah kepemilikan lembar saham yang dimiliki publik terhadap total saham beredar.

$$\text{Komposisi Kepemilikan Publik} = \frac{\text{jumlah kepemilikan saham publik}}{\text{jumlah saham beredar}}$$

Ket : Jumlah saham beredar dalam penelitian ini adalah jumlah saham beredar pada tahun 2013 dan 2014.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2014. Perusahaan yang terdaftar berjumlah 82 perusahaan. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dengan metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Adapun kriteria pemilihan sampel sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor tambang terdaftar di BEI di tahun 2013 dan 2014
2. Mengungkapkan informasi yang dibutuhkan terkait penelitian, yaitu CSR, komite audit, dewan komisaris independen, dan kepemilikan saham.

Setelah dilakukan pemilihan sampel dengan pertimbangan atau kriteria diatas, diperoleh sampel sebanyak 76 perusahaan.

Tabel 2. Prosedur Pemilihan Sampel

No.	Kriteria Sampel Penelitian	Total
1.	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2014	82
2.	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI hanya pada periode 2013 atau 2014	(4)
3.	Perusahaan yang tidak memiliki informasi atau ketersediaan data yang akan digunakan dalam penelitian	(2)
Jumlah sampel penelitian yang memenuhi kriteria		76

Berikut adalah daftar perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini :

Tabel 3. Daftar Sampel Perusahaan

NO	KODE PERUSAHAAN	NAMA PERUSAHAAN
1	ITMG	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
2	BSSR	PT Baramulti Suksessarana Tbk
3	ARII	PT Atlas Resources Tbk
4	ATPK	PT ATPK Resources Tbk
5	BRAU	PT Berau Coal Energy Tbk
6	BUMI	PT BUMI Resources Tbk
7	BYAN	PT Bayan Resources Tbk
8	DEWA	PT Darma Henwa Tbk
9	DOID	PT Delta Dunia Makmur Tbk
10	GEMS	PT Golden Energy Mines Tbk
11	GTBO	PT Garda Tujuh Buana
12	HRUM	PT Harum Energy Tbk
13	KKGI	PT Resources Alam Indonesia Tbk

14	BORN	PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk
15	MYOH	PT Samindo Resource Tbk
16	PTBA	PT Bukit Asam Tbk
17	PTRO	PT Petrosea Tbk
18	SMMT	PT Golden Eagle Energy Tbk
19	TOBA	PT Toba Bara Sejahtera Tbk
20	CTTH	PT Citatah Tbk
21	MITI	PT Mitra Investindo Tbk
22	TINS	PT Timah Tbk
23	ANTM	PT Aneka Tambang Tbk
24	CITA	PT Cita Mineral Investindo Tbk
25	CKRA	PT Cakra Mineral Tbk
26	DKFT	PT Central Omega Resources
27	INCO	PT Vale Indonesia Tbk
28	PSAB	PT J Resources Asia Pasifik Tbk
29	SMRU	PT SMR Utama Tbk
30	MEDC	PT Medco Energi Internasional Tbk
31	ARTI	PT Ratu Prabu Energi Tbk
32	ELSA	PT Elnusa Tbk
33	ENRG	PT Energi Mega Persada Tbk
34	ESSA	PT Surya Esa Pekasa Tbk
35	RUIS	PT Radiant Utama Interisco
36	ADRO	PT Adaro Energy Tbk
37	BIPI	PT Benakat Petroleum Energy Tbk
38	APEX	PT Apexindo Pratama Duta Tbk

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen laporan keuangan yang telah diterbitkan emiten yang bersangkutan di website resmi Bursa Efek Indonesia *www.idx.co.id* dan *www.icamel.id*. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa

laporan tahunan perusahaan tambang yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia per 31 Desember selama periode 2013 sampai dengan 2014.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda. Untuk pengujian hipotesis menggunakan uji *adjusted R Squared* dan uji parsial(t test).

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2009). Standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum menggambarkan persebaran data. Data yang memiliki standar deviasi yang semakin besar menggambarkan data tersebut semakin menyebar. Standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum menggambarkan persebaran variabel yang bersifat metrik.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik harus dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias, mengingat tidak pada semua data regresi dapat diterapkan. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji Normalitas, uji Multikolineraritas, uji Heteroskedastisitas, dan uji Autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam uji Normalitas ini ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2009). Alat uji yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan analisis grafik histogram dan grafik *normal probability plot* dan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)*.

b. Uji Mutikolinearitas

Uji multikolineraritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (Ghozali, 2009). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolineraritas, dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2009). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini, maka dapat diuji dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan nilai residualnya SRESID. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali, 2009):

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $(t-1)$. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi yang lain. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, salah satunya adalah dengan uji Durbin-Watson (D-W test). Uji Durbin Watson banyak digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intersep dalam model regresi dan tidak ada autokorelasi lagi diantara variabel bebas, yang ditujukan dengan nilai D-W ada diantara nilai 2 dan 4-2.

3. Analisis Regresi Sederhana

Analisis Regresi Linear Sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel Independen (X) dengan variabel Dependen (Y) menggunakan persamaan regresi linear sederhana dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

Keterangan:

Y : Variabel Dependen

a : Konstanta

X : Variabel Independen

b : Koefisien regresi b

Berdasarkan persamaan di atas, maka nilai a dan b dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Rumus untuk mengetahui besarnya nilai a

$$a = \frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

Rumus untuk mengetahui besarnya nilai b

$$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

Dimana :

n = Jumlah data sampel

4. Analisis Regresi Berganda

Metode regresi linier berganda (*multiple regression*) dilakukan terhadap model yang diajukan penulis untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hubungan antara karakteristik GCG dengan pengungkapan CSR perusahaan diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$CSRDI_i = \beta_0 + \beta_1 KA + \beta_2 KDKI + \beta_3 KKI + \beta_4 KKA + \beta_5 KKP + E$$

Keterangan:

CSRDI_i = Indeks pengungkapan CSR perusahaan i

KA = Ukuran Komite Audit

KDKI = Komposisi Dewan Komisaris Independen

KKI = Komposisi Kepemilikan Institusi

KKA = Komposisi Kepeemilikan Asing

KKP = Komposisi Kepeemilikan Publik

E = *error term*

5. Pengujian Hipotesis

Pada dasarnya ada dua jenis alat uji statistik, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik digunakan jika distribusi data yang digunakan normal, sedangkan data yang bersifat tidak normal menggunakan uji statistik non parametrik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengujian statistik parametrik.

Statistik parametrik digunakan apabila peneliti mengetahui fakta yang pasti mengenai sekelompok data yang menjadi sumber sampel (J. Supranto, 2001). Menurut Ghazali (2009) ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar uji statistik parametrik dapat digunakan, yaitu:

1. Observasi harus independen
2. Populasi asal observasi harus berdistribusi normal
3. Variasi populasi masing-masing grup dalam hal analisis dengan dua grup harus sama.
4. Variabel harus diukur paling tidak dalam skala interval.

Jika distribusi data bersifat normal, maka digunakanlah uji statistik parametrik. Uji regresi merupakan salah satu jenis uji statistik parametrik. Untuk menguji hipotesis yang diajukan penulis, maka akan dilakukan uji pengaruh simultan (*F test*), uji koefisien determinasi, dan uji pengaruh parsial (*t test*).

a. Ukuran Komite Audit

$H_{01} : \beta_1 \leq 0$: Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan *corporate social responsibility*

$H_{a1} : \beta_1 > 0$: Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan *corporate social responsibility*

b. Komposisi Dewan Komisaris Independen

$H_{02} : \beta_2 \leq 0$: Komposisi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan *corporate social responsibility*

$H_{a2} : \beta_2 > 0$: Komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan *corporate social responsibility*

c. Kepemilikan Institusi

$H_{03} : \beta_3 \leq 0$: Komposisi Kepemilikan Institusi tidak berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan *corporate social responsibility*

$H_{a3} : \beta_3 > 0$: Komposisi Kepemilikan Institusi berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan *corporate social responsibility*

d. Kepemilikan Asing

$H_{04} : \beta_4 \leq 0$: Komposisi Kepemilikan Asing tidak berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan *corporate social responsibility*

$H_{a4} : \beta_4 > 0$: Komposisi Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan *corporate social responsibility*

e. Kepemilikan Publik

$H_{05} : \beta_5 \leq 0$: Komposisi Kepemilikan Publik tidak berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan *corporate social responsibility*

$H_{a5} : \beta_5 > 0$: Komposisi Kepemilikan Publik berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan *corporate social responsibility*

6. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2006) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel pada

tingkat signifikansi 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen dan hipotesis dapat diterima. Sebaliknya, jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada tingkat signifikansi 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen dan hipotesis tidak dapat diterima atau ditolak (Duwi Priyanto, 2013: 48). Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka koefisien regresi tidak signifikan. Ini berarti bahwa secara simultan variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka koefisien regresi signifikan. Ini berarti secara simultan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

7. Uji Adjusted R Squared (Adj. R^2)

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel independen, tapi karena R^2 mengandung kelemahan mendasar, yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, maka dalam penelitian ini menggunakan *adjusted R^2* berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai *adjusted R^2* semakin mendekati 1 maka semakin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen.

8. Uji Parsial (t test)

Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Jika t_{hitung} lebih besar dibandingkan dengan t_{tabel} pada taraf signifikansi 5%, maka variabel pengaruh memiliki pengaruh yang signifikan. Sebaliknya jika t_{hitung} lebih kecil dibandingkan t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% maka variabel tersebut memiliki pengaruh yang tidak signifikan.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka koefisien regresi tidak signifikan. Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b) Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka koefisien regresi signifikan. Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis melakukan analisis data yang sudah terkumpul dalam bentuk *annual report* perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 dan 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel Ukuran Komite Audit, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Komposisi Kepemilikan Institusi, Komposisi Kepemilikan Asing dan Komposisi Kepemilikan Publik terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Berdasarkan perumusan kerangka pemikiran yang telah diungkapkan sebelumnya, sekaligus untuk kepentingan pengujian hipotesis maka teknik analisis yang digunakan dalam analisis ini adalah analisis deskriptif, analisis statistik (uji asumsi klasik), analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda.

A. Deskripsi Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ukuran Komite Audit, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Komposisi Kepemilikan Institusional, Komposisi Kepemilikan Asing dan Komposisi Kepemilikan Publik terhadap Tingkat Pengungkapan CSR pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2014. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu laporan keuangan perusahaan sektor

pertambangan yang terdaftar di BEI. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan dalam rentang tahun 2013-2014.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BEI, populasi untuk penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar selama periode penelitian berjumlah 82 perusahaan. Setelah dilakukan seleksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka diperoleh sampel akhir sebanyak 76 perusahaan. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya pada Bab III. Untuk menjawab permasalahan yang diajukan dan pengujian hipotesis, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif, analisis asumsi klasik, analisis regresi sederhana dan analisis regresi linier berganda.

B. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Berikut adalah penjelasan hasil analisis statistik deskriptif yaitu deskripsi data dari seluruh variabel yang akan dimasukkan dalam model penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
CSR	76	0,253	0,549	0,37612	0,079559
Komite Audit		1,000	6,000	3,06579	0,660011
Komposisi Dewan Komisaris Independen		0,143	0,667	0,43255	0,111910
Komposisi Kepemilikan Institusi		0,209	0,972	0,54891	0,212817
Komposisi Kepemilikan Asing		0,000	0,968	0,37867	0,314806
Komposisi Kepemilikan Asing		0,025	0,679	0,30149	0,180193
Valid N (Listwise)	76				

Sumber: Data sekunder diolah 2016

1. *Corporate Social Responsibility*

Hasil uji statistik deskriptif terhadap variabel dependen *Corporate Social Responsibility* menunjukkan bahwa nilai terkecil untuk CSR sebesar 25,3%. Nilai terbesar dari CSR sebesar 54,9%. Rata rata tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sebesar 37,6%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan CSR yang terjadi di Indonesia bisa dikatakan masih relatif kecil, karena persentasenya masih di bawah 50%. Standar deviasi lebih rendah daripada nilai rata-ratanya menunjukkan bahwa tingkat sebaran *Corporate Social Responsibility* memiliki variasi yang cukup rendah.

Berikut adalah penentuan jumlah kelas menggunakan rumus *Sturges* :

Menghitung Kelas Interval

$$K = 1 + 3,3 (\log n)$$

$$K = 1 + 3,3 (\log 76)$$

$$K = 1 + 3,3 (1,8808)$$

$$K = 1 + 6,20664$$

$$K = 7.206685 \text{ dibulatkan menjadi } 7$$

Menghitung Rentang Data

$$RD = (\text{Nilai Maximum} - \text{Nilai Minimum})$$

$$RD = (0,549 - 0,253)$$

$$RD = 0,296$$

Menghitung Panjang Kelas

$$PK = \text{Rentang Data} / \text{Jumlah Kelas Interval}$$

$$PK = 0,296 / 7$$

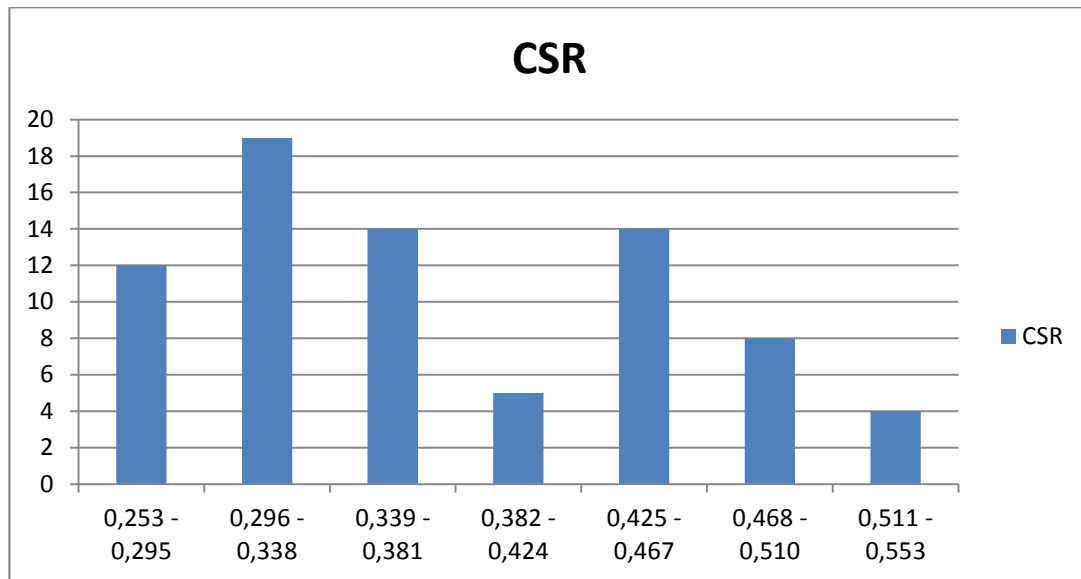
$$PK = 0,042$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka distribusi frekuensi CSR dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Distribusi Frekuensi CSR

no	Inteval			Frekuensi	Persentase
1	0.253	sampai	0.295	12	16%
2	0.296	sampai	0.338	19	25%
3	0.339	sampai	0.381	14	18%
4	0.382	sampai	0.424	5	7%
5	0.425	sampai	0.467	14	18%
6	0.468	sampai	0.510	8	11%
7	0.511	sampai	0.553	4	5%
TOTAL				76	100%

Sumber: Data sekunder diolah 2016



Gambar 2. Histogram Distribusi Frekuensi CSR

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, dapat dilihat bahwa persebaran distribusi data variabel CSR yang paling banyak terjadi di antara rentang 0,296 sampai 0,338 dengan persentase sebanyak 25% dan frekuensi sebanyak 19. Persebaran distribusi data CSR yang paling sedikit terjadi di rentang data 0,511 sampai 0,553 dengan persentase sebanyak 5% dan frekuensi sebanyak 4.

2. Komite Audit

Hasil uji statistik deskriptif terhadap variabel independen Komite Audit menunjukkan bahwa nilai terkecil sebesar 1 dan nilai terbesar sebesar 6. Rata rata komite audit di dalam perusahaan pertambangan sebesar 3,07. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit sebagian besar perusahaan pertambangan di Indonesia cukup besar dan menunjukkan keseriusan perusahaan pertambangan untuk

lebih mengontrol aktivitas bisnisnya. Standar deviasi lebih rendah daripada nilai rata-ratanya menunjukkan bahwa tingkat sebaran komite audit memiliki variasi yang cukup rendah.

Berikut ini adalah penentuan jumlah kelas menggunakan rumus *Sturges*:

Menghitung Kelas Interval

$$K = 1 + 3,3 (\log n)$$

$$K = 1 + 3,3 (\log 76)$$

$$K = 1 + 3,3 (1,8808)$$

$$K = 1 + 6,20664$$

$$K = 7.206685 \text{ dibulatkan menjadi } 7$$

Menghitung Rentang Data

$$RD = (\text{Nilai Maximum} - \text{Nilai Minimum})$$

$$RD = (6 - 1)$$

$$RD = 5$$

Menghitung Panjang Kelas

$$PK = \text{Rentang Data} / \text{Jumlah Kelas Interval}$$

$$PK = 5 / 7$$

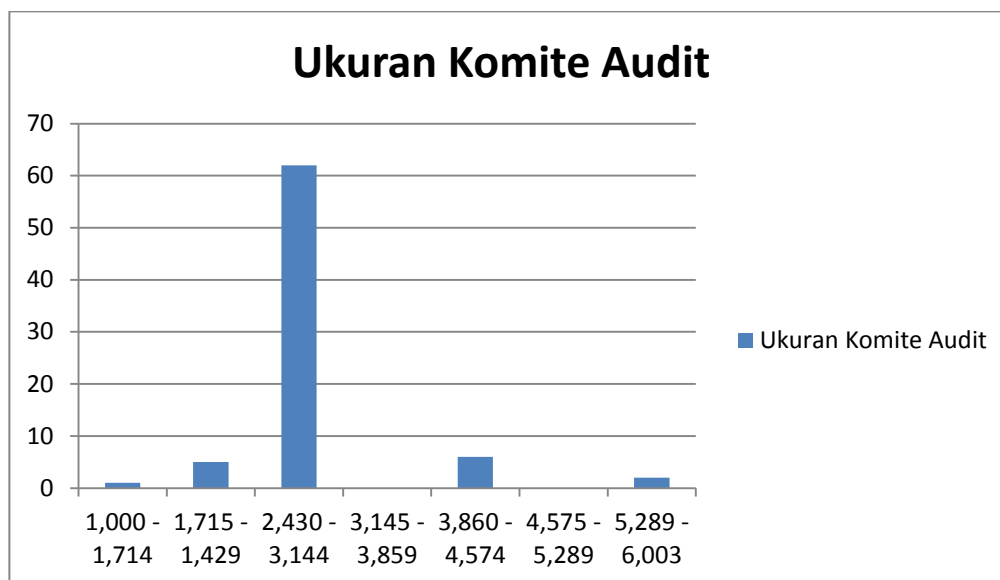
$$PK = 0,714$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka distribusi frekuensi Komite Audit dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Komite Audit

No	Inteval			Frekuensi	Persentase
1	1.000	sampai	1.714	1	1%
2	1.715	sampai	2.429	5	7%
3	2.43	sampai	3.144	62	82%
4	3.145	sampai	3.859	0	0%
5	3.86	sampai	4.574	6	8%
6	4.575	sampai	5.289	0	0%
7	5.289	sampai	6.003	2	3%
TOTAL				76	100%

Sumber: Data sekunder diolah 2016

**Gambar 3. Histogram Distribusi Frekuensi Komite Audit**

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, dapat dilihat bahwa persebaran distribusi data variabel Komite Audit yang paling banyak terjadi di antara rentang 2,430 sampai 3,144 sampai dengan persentase sebanyak 82% dan frekuensi sebanyak

62. Persebaran distribusi data Komite Audit yang paling sedikit terjadi di rentang data 1,000 sampai 1,714 dengan persentase sebanyak 1% dan frekuensi sebanyak 1.

3. Dewan Komisaris Independen

Hasil uji statistik deskriptif terhadap variabel independen Komposisi Dewan Komisaris Independen menunjukkan bahwa nilai terkecil sebesar 14,3% dan nilai terbesar sebesar 66,7%. Rata rata Komposisi Dewan Komisaris Independen di dalam perusahaan pertambangan sebesar 43,2%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris independen di sebagian besar perusahaan pertambangan di Indonesia masih relatif rendah yang mengakibatkan masih rendahnya pengawasan terhadap dewan komisaris dan mengindikasikan rendahnya pengawasan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Standar deviasi lebih rendah daripada nilai rata-ratanya menunjukkan bahwa tingkat sebaran Komposisi Dewan Komisaris Independen memiliki variasi yang cukup rendah.

Berikut ini adalah penentuan jumlah kelas menggunakan rumus *Sturges*:

Menghitung Kelas Interval

$$K = 1 + 3,3 (\log n)$$

$$K = 1 + 3,3 (\log 76)$$

$$K = 1 + 3,3 (1,8808)$$

$$K = 1 + 6,20664$$

$$K = 7.206685 \text{ dibulatkan menjadi } 7$$

Menghitung Rentang Data

$$RD = (\text{Nilai Maximum} - \text{Nilai Minimum})$$

$$RD = (0,667 - 0,143)$$

$$RD = 0,524$$

Menghitung Panjang Kelas

$$PK = \text{Rentang Data} / \text{Jumlah Kelas Interval}$$

$$PK = 0,524 / 7$$

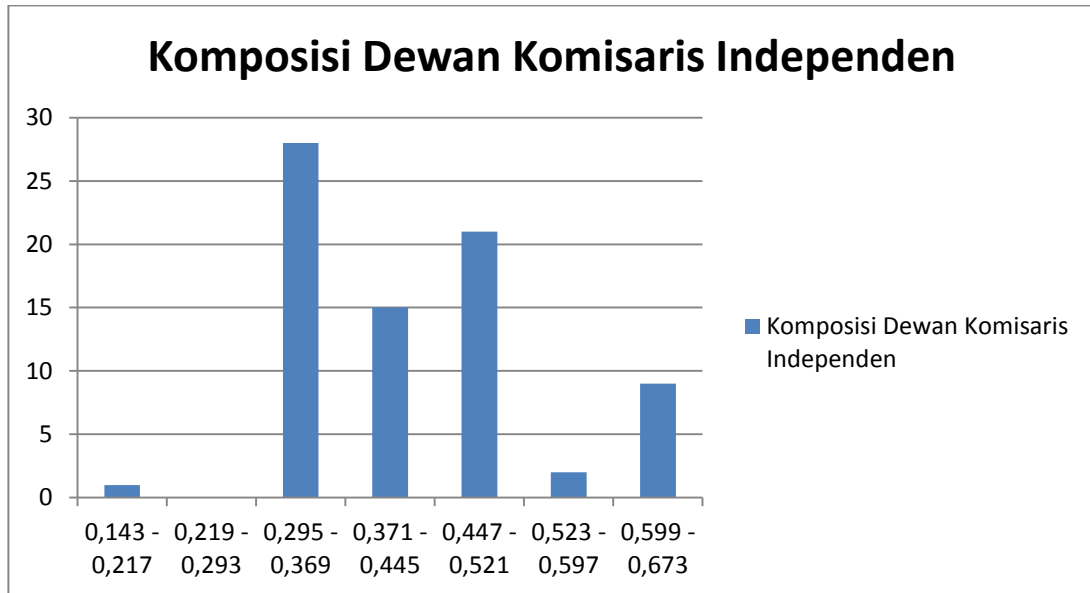
$$PK = 0,074$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka distribusi frekuensi Komposisi Dewan Komisaris Independen dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Komposisi Dewan Komisaris Independen

No	Inteval			Frekuensi	Persentase
1	0.143	sampai	0.218	1	1%
2	0.219	sampai	0.294	0	0%
3	0.295	sampai	0.370	28	37%
4	0.371	sampai	0.446	15	20%
5	0.447	sampai	0.522	21	28%
6	0.523	sampai	0.598	2	3%
7	0.599	sampai	0.674	9	12%
TOTAL				76	100%

Sumber: Data sekunder diolah 2016



Gambar 4. Histogram Distribusi Frekuensi Komposisi Dewan Komisaris Independen

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, dapat dilihat bahwa persebaran distribusi data variabel Komposisi Dewan Komisaris Independen yang paling banyak terjadi di antara rentang 0,295 sampai 0,369 dengan persentase sebanyak 37% dan frekuensi sebanyak 28. Persebaran distribusi data Komposisi Dewan Komisaris Independen yang paling sedikit terjadi di rentang data 0,143 sampai 0,217 dengan persentase sebanyak 1% dan frekuensi sebanyak 1.

4. Kepemilikan Institusi

Hasil uji statistik deskriptif terhadap variabel independen Komposisi Kepemilikan Institusi menunjukkan bahwa nilai terkecil sebesar 20,9% dan nilai terbesar sebesar 97,2%. Rata-rata Komposisi Kepemilikan Institusi pada perusahaan pertambangan yang mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* sebesar 54,8%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase Komposisi Kepemilikan Institusi di perusahaan pertambangan yang mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia bisa dikatakan cukup besar dan menunjukkan besarnya tekanan dari pemegang saham institusi kepada perusahaan pertambangan di Indonesia untuk melakukan tanggung jawab sosialnya dan mengungkapkannya. Standar deviasi lebih rendah daripada nilai rata-ratanya menunjukkan bahwa tingkat sebaran Komposisi Kepemilikan Institusi memiliki variasi yang cukup rendah.

Berikut ini adalah penentuan jumlah kelas menggunakan rumus *Sturges*:

Menghitung Kelas Interval

$$K = 1 + 3,3 (\log n)$$

$$K = 1 + 3,3 (\log 76)$$

$$K = 1 + 3,3 (1,8808)$$

$$K = 1 + 6,20664$$

$$K = 7.206685 \text{ dibulatkan menjadi } 7$$

Menghitung Rentang Data

$$RD = (\text{Nilai Maximum} - \text{Nilai Minimum})$$

$$RD = (0,972 - 0,209)$$

$$RD = 0,763$$

Menghitung Panjang Kelas

$PK = \text{Rentang Data} / \text{Jumlah Kelas Interval}$

$$PK = 1,763 / 7$$

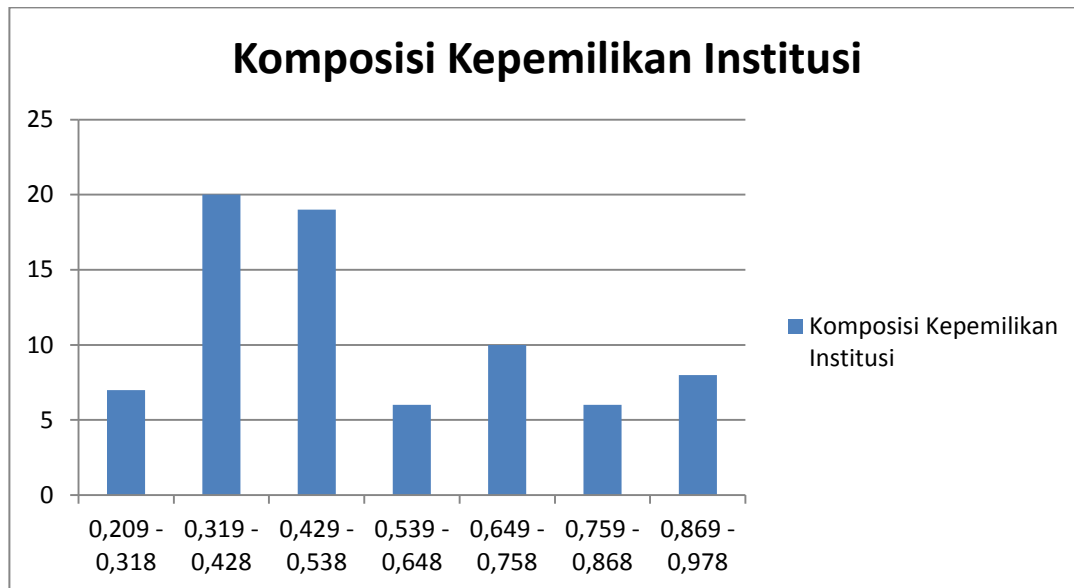
$$PK = 0,109$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka distribusi frekuensi Komposisi Kepemilikan Institusi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Komposisi Kepemilikan Institusi

No	Inteval			Frekuensi	Persentase
1	0.209	sampai	0.318	7	9%
2	0.319	sampai	0.428	20	26%
3	0.429	sampai	0.538	19	25%
4	0.539	sampai	0.648	6	8%
5	0.649	sampai	0.758	10	13%
6	0.759	sampai	0.868	6	8%
7	0.869	sampai	0.978	8	11%
TOTAL				76	100%

Sumber: Data sekunder diolah 2016



Gambar 5. Histogram Distribusi Frekuensi Komposisi Kepemilikan Institusi

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, dapat dilihat bahwa persebaran distribusi data variabel Komposisi Kepemilikan Institusi yang paling banyak terjadi di antara rentang 0,319 sampai 0,428 dengan persentase sebanyak 26% dan frekuensi sebanyak 20. Persebaran distribusi data Komposisi Kepemilikan Institusi yang paling sedikit terjadi di rentang data 0,539 sampai 0,648 dan 0,759 sampai 0,868 dengan persentase sebanyak 8% dan frekuensi sebanyak 6.

5. Kepemilikan Asing

Hasil uji statistik deskriptif terhadap variabel independen Komposisi Kepemilikan Asing menunjukkan bahwa nilai terkecil sebesar 0% dan nilai terbesar sebesar 96,8%. Rata-rata Komposisi Kepemilikan Asing pada perusahaan

pertambangan yang mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* sebesar 37,80%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase Komposisi Kepemilikan Asing di perusahaan pertambangan yang mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia bisa dikatakan cukup rendah dan menunjukkan rendahnya tekanan dari pemegang saham asing kepada perusahaan pertambangan di Indonesia untuk melakukan tanggung jawab sosialnya dan mengungkapkannya, mungkin dikarenakan lingkungan tempat perusahaan beroperasi bukan negara mereka jadi keinginan untuk memajukan lingkungan sekitar perusahaan masih rendah. Standar deviasi lebih rendah daripada nilai rata-ratanya menunjukkan bahwa tingkat sebaran Komposisi Kepemilikan Asing memiliki variasi yang cukup rendah.

Berikut ini adalah penentuan jumlah kelas menggunakan rumus *Sturges*:

Menghitung Kelas Interval

$$K = 1 + 3,3 (\log n)$$

$$K = 1 + 3,3 (\log 76)$$

$$K = 1 + 3,3 (1,8808)$$

$$K = 1 + 6,20664$$

$$K = 7.206685 \text{ dibulatkan menjadi } 7$$

Menghitung Rentang Data

$$RD = (\text{Nilai Maximum} - \text{Nilai Minimum})$$

$$RD = (0,968 - 0)$$

$$RD = 0,968$$

Menghitung Panjang Kelas

$$PK = \text{Rentang Data} / \text{Jumlah Kelas Interval}$$

$$PK = 0,968 / 7$$

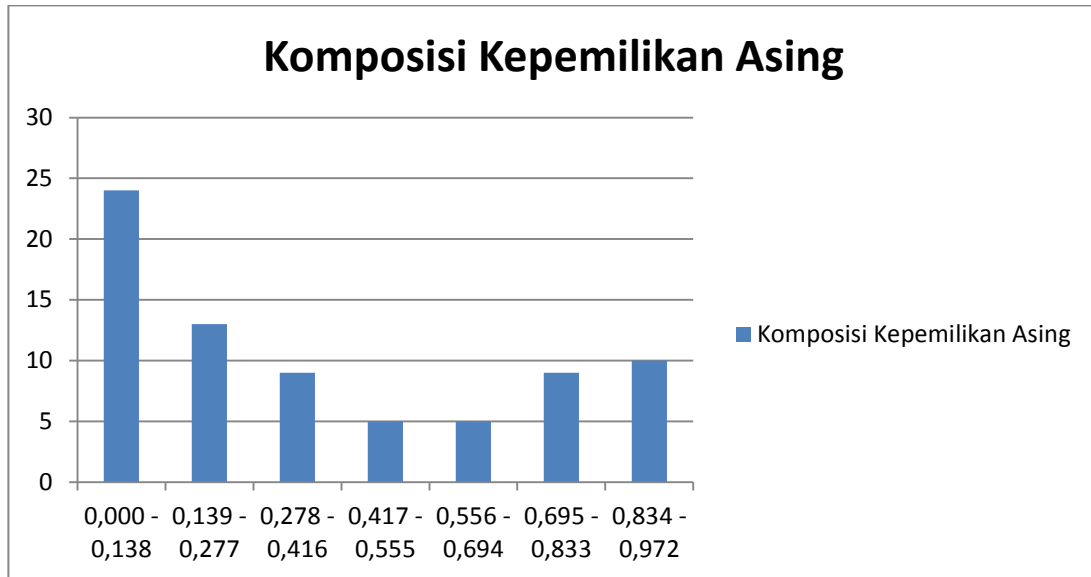
$$PK = 0,138$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka distribusi frekuensi Komposisi Kepemilikan Institusi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Distribusi Frekuensi Komposisi Kepemilikan Asing

No	Inteval			Frekuensi	Persentase
1	0.000	sampai	0.138	24	32%
2	0.139	sampai	0.277	13	17%
3	0.278	sampai	0.416	9	12%
4	0.417	sampai	0.555	5	7%
5	0.556	sampai	0.694	5	7%
6	0.695	sampai	0.833	9	12%
7	0.834	sampai	0.972	10	13%
TOTAL				75	99%

Sumber: Data sekunder diolah 2016



Gambar 6. Histogram Distribusi Frekuensi Komposisi Kepemilikan Asing

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, dapat dilihat bahwa persebaran distribusi data variabel Komposisi Kepemilikan Asing yang paling banyak terjadi di antara rentang 0,000 sampai 0,138 dengan persentase sebanyak 32% dan frekuensi sebanyak 24. Persebaran distribusi data Komposisi Kepemilikan Asing yang paling sedikit terjadi di rentang data 0,417 sampai 0,555 dan 0,556 sampai 0,694 dengan persentase sebanyak 7% dan frekuensi sebanyak 5.

6. Kepemilikan Publik

Hasil uji statistik deskriptif terhadap variabel independen Komposisi Kepemilikan Publik diketahui nilai terkecil sebesar 2,5% dan nilai terbesar sebesar 67,9%. Rata rata Komposisi Kepemilikan Publik pada perusahaan pertambangan yang mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* sebesar 30,1%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase Komposisi Kepemilikan Publik di perusahaan pertambangan yang mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia bisa dikatakan cukup rendah dan menunjukkan rendahnya kesadaran pemegang saham publik terhadap pengungkapan CSR. Mungkin dikarenakan publik yang menjadi investor tidak merasakan secara langsung dampak dari kegiatan perusahaan seperti kerusakan lingkungan yang terjadi di tempat perusahaan beroperasi. Standar deviasi lebih rendah daripada nilai rata-ratanya menunjukkan bahwa tingkat sebaran Komposisi Kepemilikan Asing memiliki variasi yang cukup rendah.

Berikut ini adalah penentuan jumlah kelas menggunakan rumus *Sturges*:

Menghitung Kelas Interval

$$K = 1 + 3,3 (\log n)$$

$$K = 1 + 3,3 (\log 76)$$

$$K = 1 + 3,3 (1,8808)$$

$$K = 1 + 6,20664$$

$$K = 7.206685 \text{ dibulatkan menjadi } 7$$

Menghitung Rentang Data

$$RD = (\text{Nilai Maximum} - \text{Nilai Minimum})$$

$$RD = (0,679 - 0,025)$$

$$RD = 0,654$$

Menghitung Panjang Kelas

$$PK = \text{Rentang Data} / \text{Jumlah Kelas Interval}$$

$$PK = 0,654 / 7$$

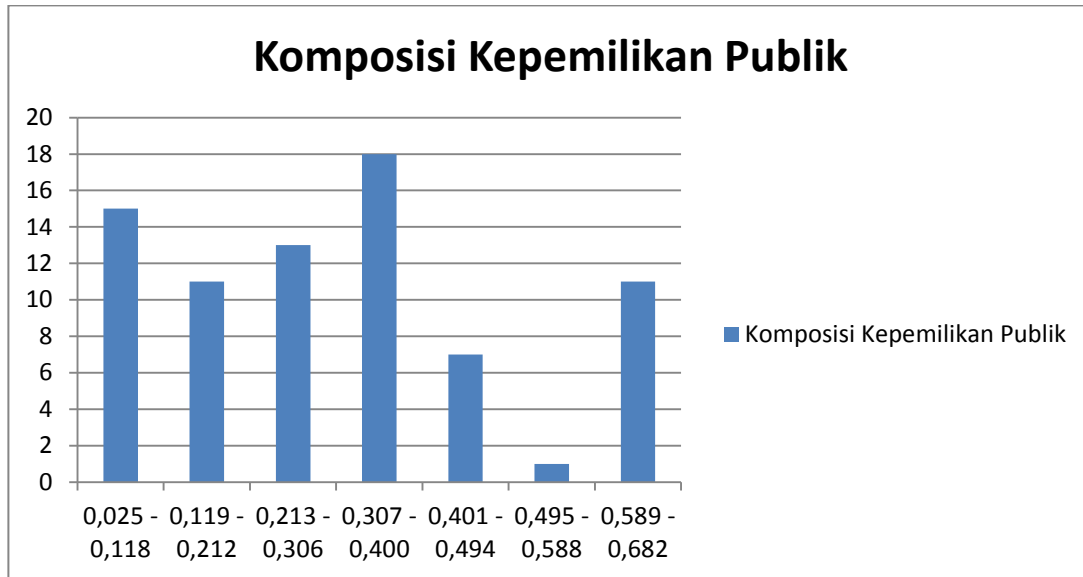
$$PK = 0,093$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka distribusi frekuensi Komposisi Kepemilikan Institusi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10. Distribusi Frekuensi Komposisi Kepemilikan Publik

No	Inteval			Frekuensi	Persentase
1	0.025	sampai	0.118	15	20%
2	0.119	sampai	0.212	11	14%
3	0.213	sampai	0.306	13	17%
4	0.307	sampai	0.400	18	24%
5	0.401	sampai	0.494	7	9%
6	0.495	sampai	0.588	1	1%
7	0.589	sampai	0.682	11	14%
TOTAL				76	100%

Sumber: Data sekunder diolah 2016



Gambar 7. Histogram Distribusi Frekuensi Komposisi Kepemilikan Publik

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, dapat dilihat bahwa persebaran distribusi data variabel Komposisi Kepemilikan Publik yang paling banyak terjadi di antara rentang 0,307 sampai 0,400 dengan persentase sebanyak 24% dan frekuensi sebanyak 18. Persebaran distribusi data Komposisi Kepemilikan Publik yang paling sedikit terjadi di rentang data 0,495 sampai 0,588 dengan persentase sebanyak 1% dan frekuensi sebanyak 1.

B. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik bertujuan untuk melihat apakah model regresi untuk peramalan memenuhi asumsi-asumsi dalam regresi sederhana dan berganda. Tahap

uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas diukur menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 11. Hasil Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

Variabel	Probabilitas	Keterangan
<i>Residual Regresion</i>	0,996	Normal

Sumber: Data sekunder diolah 2016

Hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogorov Smirnov* menghasilkan nilai *Asymp.Sig.(2-tailed)* sebesar 0,996. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi ini terdistribusi normal karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi korelasi antar variabel-variabel independen. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 12. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Toleransi	VIF	Keterangan
Komite Audit	0,927	1,078	Tidak ada multikolinieritas
KDKI	0,908	1,101	Tidak ada multikolinieritas
KKI	0,738	1,355	Tidak ada multikolinieritas
KKA	0,892	1,121	Tidak ada multikolinieritas
KKP	0,823	1,215	Tidak ada multikolinieritas

Sumber: Data sekunder diolah 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa semua variabel independen memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0.1 dan memiliki nilai VIF kurang dari 10. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang kuat antar variabel independen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah gangguan yang muncul dalam fungsi regresi populasi yang mempunyai variabel tidak sama. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 13. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Komite Audit	0,768	Tidak ada heteroskedastisitas
KDKI	0,400	Tidak ada heteroskedastisitas
KKI	0,920	Tidak ada heteroskedastisitas
KKA	0,467	Tidak ada heteroskedastisitas
KKP	0,590	Tidak ada heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder diolah 2016

Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser yaitu dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel-variabel independen. Berdasarkan hasil uji Glejser, diketahui bahwa tingkat signifikansi dari masing-masing variabel bebas adalah di atas 5%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pun variabel independen yang signifikan mempengaruhi nilai absolut. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah gejala terjadinya korelasi diantara kesalahan pengganggu dari suatu observasi lainnya. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji *Durbin Watson*. Hasil Uji Durbin Watson dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 14. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R ²	<i>Adjusted R²</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	0,739	0,513	0,055519	2,235

Sumber: Data sekunder diolah 2016

Berdasarkan hasil olah data, diketahui bahwa nilai *Durbin Watson* sebesar 2,235 yang berada pada daerah 1,55 – 2,46 yaitu berada pada daerah tidak ada autokorelasi. Dengan demikian dari model regresi tidak terjadi gejala autokorelasi dan model regresi yang diajukan dapat diterima.

C. Hasil Uji Hipotesis

1. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Tingkat Pengungkapan CSR

Hipotesis pertama menyatakan bahwa “Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan CSR”. Dengan bantuan sprogram Statistik (SPSS) diperoleh rangkuman hasil analisis regresi seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 15. Hasil Uji Regresi Hipotesis 1

Variabel	Konstanta	Koefisien Regresi	Nilai t		
			t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.
Komite Audit-CSR	0,246	0,043	3,249	1,992	0,002

Sumber: Data sekunder diolah 2016

a. Persamaan Regresi

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat nilai konstanta sebesar 0,246 dan koefisien regresi Ukuran Komite Audit terhadap Tingkat Pengungkapan CSR sebesar 0,043. Dari hasil tersebut, dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,246 + 0,043 X_1$$

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier sederhana yang ditunjukkan pada tabel di atas dapat diketahui nilai konstanta sebesar 0,246 menunjukkan bahwa besarnya Tingkat Pengungkapan CSR (Y) sebesar 0,246 tanpa dipengaruhi oleh Ukuran Komite Audit ($X = 0$). Ukuran Komite Audit (X_1) mempunyai pengaruh yang positif dengan Tingkat Pengungkapan CSR, dengan koefisien regresi sebesar 0,043. Dengan adanya pengaruh yang positif ini, berarti bahwa antara Ukuran Komite Audit (X_1) dan Tingkat Pengungkapan CSR menunjukkan pengaruh yang searah. Ukuran Komite Audit (X_1) yang semakin meningkat mengakibatkan Tingkat Pengungkapan CSR juga meningkat, begitu pula dengan Ukuran Komite Audit (X_1) yang semakin menurun maka Tingkat Pengungkapan CSR juga akan menurun.

b. Uji Signifikasi Regresi Sederhana (Uji-t)

Uji signifikansi dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Uji signifikansi dapat pula dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas signifikansi yang sebelumnya telah ditentukan yaitu 0,05. Hasil uji t pada variabel Ukuran Komite Audit menunjukkan hasil t hitung sebesar 3,249 jika dibandingkan dengan t tabel pada tingkat signifikansi 0,05 yaitu 1,992 maka nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($3,249 > 1,992$). Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,002 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Ukuran Komite Audit secara parsial terhadap Tingkat Pengungkapan CSR. Dengan demikian maka hipotesis pertama yang menyatakan “Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”, dapat diterima.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 16. Koefisien Determinasi Ukuran Komite Audit

Variabel	R	R ²	Adjusted R ²
Komite Audit	0,353	0,125	0,113

Sumber: Data sekunder diolah 2016

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,125. Hal ini berarti Tingkat Pengungkapan CSR perusahaan pertambangan,

12,5% dapat dijelaskan oleh Ukuran Komite Audit sedangkan sisanya sebesar 87,5% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya.

2. Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Tingkat Pengungkapan CSR

Hipotesis kedua menyatakan bahwa “Komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan CSR”. Dengan bantuan sprogram Statistik (SPSS) diperoleh rangkuman hasil analisis regresi seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 17. Hasil Uji Regresi Hipotesis 2

Variabel	Konstanta	Koefisien Regresi	Nilai t		
			t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.
Komposisi Dewan Komisaris Independen-CSR	0,368	0,018	0,213	1,992	0,833

Sumber: Data sekunder diolah 2016

a. Persamaan Regresi

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat nilai konstanta sebesar 0,368 dan koefisien regresi Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Tingkat Pengungkapan CSR sebesar 0,018. Dari hasil tersebut, dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,368 + 0,018X_2$$

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier sederhana yang ditunjukkan pada tabel di atas dapat diketahui nilai konstanta sebesar 0,368 menunjukkan bahwa besarnya Tingkat Pengungkapan CSR (Y) sebesar 0,368 tanpa dipengaruhi oleh Komposisi Dewan Komisaris Independen ($X = 0$). Komposisi Dewan Komisaris Independen (X_2) mempunyai pengaruh yang positif dengan Tingkat Pengungkapan CSR, dengan koefisien regresi sebesar 0,018. Dengan adanya pengaruh yang positif ini, berarti bahwa antara Komposisi Dewan Komisaris Independen (X_2) dan Tingkat Pengungkapan CSR menunjukkan pengaruh yang searah. Komposisi Dewan Komisaris Independen (X_2) yang semakin meningkat mengakibatkan Tingkat Pengungkapan CSR juga meningkat, begitu pula dengan Komposisi Dewan Komisaris Independen (X_2) yang semakin menurun maka Tingkat Pengungkapan CSR juga akan menurun.

b. Uji Signifikansi Regresi Sederhana (Uji-t)

Uji signifikansi dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Uji signifikansi dapat pula dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas signifikansi yang sebelumnya telah ditentukan yaitu 0,05. Hasil uji t pada variabel Komposisi Dewan Komisaris Independen menunjukkan hasil t hitung sebesar 0,213 jika dibandingkan dengan t tabel pada tingkat signifikansi 0,05 yaitu 1,992 maka nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($0,213 < 1,992$). Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,832 yang nilainya lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Komposisi Dewan Komisaris Independen

terhadap Tingkat Pengungkapan CSR. Dengan demikian maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “Komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”, ditolak.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 18. Koefisien Determinasi Komposisi Dewan Komisaris Independen

Variabel	R	R ²	Adjusted R ²
Komposisi Dewan Komisaris Independen	0,025	0,001	-0,013

Sumber: Data sekunder diolah 2016

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,001. Hal ini berarti Tingkat Pengungkapan CSR perusahaan pertambangan, 1% dapat dijelaskan oleh Komposisi Dewan Komisaris Independen sedangkan sisanya sebesar 99% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya.

3. Pengaruh Komposisi Kepemilikan Institusi terhadap Tingkat Pengungkapan CSR

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa “Komposisi Kepemilikan Institusi berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan CSR”. Dengan bantuan program

Statistik (SPSS) diperoleh rangkuman hasil analisis regresi seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 19. Hasil Uji Regresi Hipotesis 3

Variabel	Konstanta	Koefisien Regresi	Nilai t		
			t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.
Komposisi Kepemilikan Institusi-CSR	0,336	0,073	1,702	1,992	0,093

Sumber: Data sekunder diolah 2016

a. Persamaan Regresi

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat nilai konstanta sebesar 0,336 dan koefisien regresi Komposisi Kepemilikan Institusi terhadap Tingkat Pengungkapan CSR sebesar 0,073. Dari hasil tersebut, dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,336 + 0,073X_3$$

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier sederhana yang ditunjukkan pada tabel di atas dapat diketahui nilai konstanta sebesar 0,336 menunjukkan bahwa besarnya Tingkat Pengungkapan CSR (Y) sebesar 0,336 tanpa dipengaruhi oleh Komposisi Kepemilikan Institusi ($X = 0$). Komposisi Kepemilikan Institusi (X_3) mempunyai pengaruh yang positif dengan Tingkat Pengungkapan CSR, dengan koefisien regresi sebesar 0,073. Dengan adanya pengaruh yang positif ini, berarti bahwa antara Komposisi Kepemilikan Institusi (X_3) dan Tingkat Pengungkapan CSR

menunjukkan pengaruh yang searah. Komposisi Kepemilikan Institusi (X_3) yang semakin meningkat mengakibatkan Tingkat Pengungkapan CSR juga meningkat, begitu pula dengan Komposisi Kepemilikan Institusi (X_3) yang semakin menurun maka Tingkat Pengungkapan CSR juga akan menurun.

b. Uji Signifikansi Regresi Sederhana (Uji-t)

Uji signifikansi dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Uji signifikansi dapat pula dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas signifikansi yang sebelumnya telah ditentukan yaitu 0,05. Hasil uji t pada variabel Komposisi Kepemilikan Institusi menunjukkan hasil t hitung sebesar 1,702 jika dibandingkan dengan t tabel pada tingkat signifikansi 0,05 yaitu 1,992 maka nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($1,702 < 1,992$). Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,093 yang nilainya lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Komposisi Kepemilikan Institusi terhadap Tingkat Pengungkapan CSR. Dengan demikian maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “Komposisi Kepemilikan Institusi berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”, ditolak.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 20. Koefisien Determinasi Komposisi Kepemilikan Institusional

Variabel	R	R2	Adjusted R2
Komposisi Kepemilikan Institusi	0,194	0,038	0,025

Sumber: Data sekunder diolah 2016

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,038. Hal ini berarti Tingkat Pengungkapan CSR perusahaan pertambangan, 3,8% dapat dijelaskan oleh Komposisi Kepemilikan Institusi sedangkan sisanya sebesar 96,2% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya.

4. Pengaruh Komposisi Kepemilikan Asing terhadap Tingkat Pengungkapan CSR

Hipotesis keempat menyatakan bahwa “Komposisi Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan CSR”. Dengan bantuan program Statistik (SPSS) diperoleh rangkuman hasil analisis regresi seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 21. Hasil Uji Regresi Hipotesis 4

Variabel	Konstanta	Koefisien Regresi	Nilai t		
			t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.
Komposisi Kepemilikan Asing-CSR	0,323	0,139	5,664	1,992	0,000

Sumber: Data sekunder diolah 2016

a. Persamaan Regresi

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat nilai konstanta sebesar 0,323 dan koefisien regresi Komposisi Kepemilikan Asing terhadap Tingkat Pengungkapan CSR sebesar 0,139. Dari hasil tersebut, dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,323 + 0,139X_4$$

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier sederhana yang ditunjukkan pada tabel di atas dapat diketahui nilai konstanta sebesar 0,323 menunjukkan bahwa besarnya Tingkat Pengungkapan CSR (Y) sebesar 0,323 tanpa dipengaruhi oleh Komposisi Kepemilikan Asing ($X = 0$). Komposisi Kepemilikan Asing (X_4) mempunyai pengaruh yang positif dengan Tingkat Pengungkapan CSR, dengan koefisien regresi sebesar 0,139. Dengan adanya pengaruh yang positif ini, berarti bahwa antara Komposisi Kepemilikan Asing (X_4) dan Tingkat Pengungkapan CSR menunjukkan pengaruh yang searah. Komposisi Kepemilikan Asing (X_4) yang semakin meningkat mengakibatkan Tingkat Pengungkapan CSR juga meningkat,

begitu pula dengan Komposisi Kepemilikan Asing (X_4) yang semakin menurun maka Tingkat Pengungkapan CSR juga akan menurun.

b. Uji Signifikansi Regresi Sederhana (Uji-t)

Uji signifikansi dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Uji signifikansi dapat pula dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas signifikansi yang sebelumnya telah ditentukan yaitu 0,05. Hasil uji t pada variabel Komposisi Kepemilikan Asing menunjukkan hasil t hitung sebesar 5,664 jika dibandingkan dengan t tabel pada tingkat signifikansi 0,05 yaitu 1,992 maka nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($5,664 > 1,992$). Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Komposisi Kepemilikan Asing secara parsial terhadap Tingkat Pengungkapan CSR. Dengan demikian maka hipotesis keempat yang menyatakan “Komposisi Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”, diterima.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 22. Koefisien Determinasi Komposisi Kepemilikan Asing

Variabel	R	R ²	Adjusted R ²
Komposisi Kepemilikan Asing	0,550	0,302	0,293

Sumber: Data sekunder diolah 2016

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,302. Hal ini berarti Tingkat Pengungkapan CSR perusahaan pertambangan, 30,2% dapat dijelaskan oleh Komposisi Kepemilikan Asing sedangkan sisanya sebesar 69,8% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya.

5. Pengaruh Komposisi Kepemilikan Publik terhadap Tingkat Pengungkapan CSR

Hipotesis kelima menyatakan bahwa “Komposisi Kepemilikan Publik berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan CSR”. Dengan bantuan program Statistik (SPSS) diperoleh rangkuman hasil analisis regresi seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 23. Hasil Uji Regresi Hipotesis 5

Variabel	Konstanta	Koefisien Regresi	Nilai t		
			t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.
Komposisi Kepemilikan Publik-CSR	0,421	-0,148	-3,055	1,992	0,003

Sumber: Data sekunder diolah 2016

a. Persamaan Regresi

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat nilai konstanta sebesar 0,421 dan koefisien regresi Komposisi Kepemilikan Publik terhadap Tingkat Pengungkapan

CSR sebesar -0,148. Dari hasil tersebut, dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,421 - 0,148X_5$$

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier sederhana yang ditunjukkan pada tabel di atas dapat diketahui nilai konstanta sebesar 0,421 menunjukkan bahwa besarnya Tingkat Pengungkapan CSR (Y) sebesar 0,421 tanpa dipengaruhi oleh Komposisi Kepemilikan Publik ($X = 0$). Komposisi Kepemilikan Publik (X_5) mempunyai pengaruh yang negatif dengan tingkat pengungkapan CSR, dengan koefisien regresi sebesar -0,148. Dengan adanya pengaruh yang negatif ini, berarti bahwa antara Komposisi Kepemilikan Publik (X_5) dan Tingkat Pengungkapan CSR menunjukkan pengaruh yang tidak searah. Komposisi Kepemilikan Publik (X_5) yang semakin meningkat mengakibatkan tingkat pengungkapan CSR menurun, begitu pula dengan Komposisi Kepemilikan Publik (X_5) yang semakin menurun maka Tingkat pengungkapan CSR juga akan meningkat.

b. Uji Signifikansi Regresi Sederhana (Uji-t)

Uji signifikansi dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Uji signifikansi dapat pula dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas signifikansi yang sebelumnya telah ditentukan yaitu 0,05. Hasil uji t pada variabel Komposisi Kepemilikan Asing menunjukkan hasil t hitung sebesar -3,055 jika dibandingkan dengan t tabel pada tingkat signifikansi 0,05 yaitu 1,992 maka nilai t

hitung lebih kecil dari t tabel ($-3,055 < 1,992$). Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,003 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara Komposisi Kepemilikan Publik secara parsial terhadap Tingkat Pengungkapan CSR. Dengan demikian maka hipotesis kelima yang menyatakan bahwa “Komposisi Kepemilikan Publik berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”, ditolak.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 24. Koefisien Determinasi Komposisi Kepemilikan Publik

Variabel	R	R ²	Adjusted R ²
Komposisi Kepemilikan Publik	0,335	0,112	0,100

Sumber: Data sekunder diolah 2016

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,112. Hal ini berarti Tingkat Pengungkapan CSR perusahaan pertambangan, 11,2% dapat dijelaskan oleh Komposisi Kepemilikan Publik sedangkan sisanya sebesar 88,8% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya.

6. Pengaruh Ukuran Komite Audit, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Komposisi Kepemilikan Institusi, Komposisi Kepemilikan Asing, dan Komposisi Kepemilikan Publik terhadap Tingkat Pengungkapan CSR.

Hipotesis keenam menyatakan bahwa “Ukuran Komite Audit, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Komposisi Kepemilikan Institusi, Komposisi Kepemilikan Asing, dan Komposisi Kepemilikan Publik berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan CSR”. Dengan bantuan seri program Statistik (SPSS) diperoleh rangkuman hasil analisis regresi seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel 25. Hasil Uji Regresi Hipotesis 6

Variabel	Konstanta	Koefisien Regresi	Nilai F		Sig.
			F _{hitung}	F _{tabel}	
Komite Audit	0,141	0,056	16,802	2,345	0,000
Komposisi Dewan Komisaris Independen		0,079			
Komposisi Kepemilikan Institusi		0,020			
Komposisi Kepemilikan Asing		0,133			
Komposisi Kepemilikan Publik		-0,105			

Sumber: Data sekunder diolah 2016

a. Persamaan Regresi

Dengan memperhatikan model regresi dan hasil regresi linear berganda maka didapat persamaan variabel yang mempengaruhi Tingkat Pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. sebagai berikut :

$$Y = 0,141 + 0,056KA + 0,079KDKI + 0,020KKI + 0,133KKA - 0,105KKP$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat diketahui bahwa:

- 1) Nilai konstanta 0,141, berarti bahwa jika seluruh variabel independen dianggap konstan maka nilai Tingkat Pengungkapan CSR akan sebesar 0,141.
- 2) Nilai koefisien regresi Ukuran Komite Audit (KA) sebesar 0,056, berarti bahwa jika terjadi kenaikan 1 poin Ukuran Komite Audit (variabel

independen lain dianggap konstan), maka nilai Tingkat Pengungkapan CSR akan naik 0,056 poin.

- 3) Nilai koefisien regresi Komposisi Dewan Komisaris Independen (KDKI) sebesar 0,079, berarti bahwa jika terjadi kenaikan 1 poin Komposisi Dewan Komisaris Independen (variabel independen lain dianggap konstan), maka nilai Tingkat Pengungkapan CSR akan naik 0,079 poin.
- 4) Nilai koefisien regresi Komposisi Kepemilikan Institusi (KKI) sebesar 0,020, berarti bahwa jika terjadi kenaikan 1 Komposisi Kepemilikan Institusi (variabel independen lain dianggap konstan), maka nilai Tingkat Pengungkapan CSR akan naik 0,020 poin.
- 5) Nilai koefisien regresi Komposisi Kepemilikan Asing (KKA) sebesar 0,133, berarti bahwa jika terjadi kenaikan 1 Komposisi Kepemilikan Asing (variabel independen lain dianggap konstan), maka nilai Tingkat Pengungkapan CSR akan naik 0,133 poin.
- 6) Nilai koefisien regresi Komposisi Kepemilikan Publik (KKP) sebesar - 0,105, berarti bahwa jika terjadi kenaikan 1 Komposisi Kepemilikan Publik (variabel independen lain dianggap konstan), maka nilai Tingkat Pengungkapan CSR akan turun 0,105 poin.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 26. Hasil Uji F Hipotesis 6

Variabel	F _{hitung}	F _{tabel}	Sig
Ukuran Komite Audit, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Komposisi Kepemilikan Institusi, Komposisi Kepemilikan Asing dan Komposisi Kepemilikan Publik	16,802	2,345	0,000

Sumber: Data sekunder diolah 2016

Dari tabel di atas, diketahui bahwa F_{hitung} sebesar 16,802 jika dibandingkan dengan F_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05 yaitu 2,345 maka nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($16,802 > 2,345$). Nilai probabilitas sebesar 0,000 yang nilainya jauh lebih kecil dari 0,05 maka H_6 diterima. Ini menunjukkan bahwa Ukuran Komite Audit (X_1), Komposisi Dewan Komisaris Independen (X_2), Komposisi Kepemilikan Institusi (X_3), komposisi kepemilikan asing (X_4) dan Komposisi Kepemilikan Publik (X_5) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian hipotesis kelima yang menyatakan bahwa “Ukuran Komite Audit, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Komposisi Kepemilikan Institusi, Komposisi Kepemilikan Asing dan Komposisi Kepemilikan Publik berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”, diterima.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 27. Koefisien Determinasi Ukuran Komite Audit, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Komposisi Kepemilikan Institusi, Komposisi Kepemilikan Asing dan Komposisi Kepemilikan Publik

Variabel	R	R2	Adjusted R2
Ukuran Komite Audit, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Komposisi Kepemilikan Institusi, Komposisi Kepemilikan Asing dan Komposisi Kepemilikan Publik	0,739	0,545	0,513

Sumber: Data sekunder diolah 2016

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,513. Hal ini berarti Tingkat Pengungkapan CSR perusahaan pertambangan, 51,3% dapat dijelaskan oleh Ukuran Komite Audit, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Komposisi Kepemilikan Institusi, Komposisi Kepemilikan Asing dan Komposisi Kepemilikan Publik, sedangkan sisanya sebesar 48,7% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya.

D. Pembahasan

1. Pembahasan Hipotesis Pertama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Ukuran Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hasil ini didasari oleh hasil uji regresi dimana nilai koefisien regresi

0,043 dan uji t yang menunjukkan hasil $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($3,249 > 1,992$) dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,002 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan CSR. Hal ini berarti keberadaan komite audit dapat mengindikasikan kualitas pengawasan yang lebih baik dan memiliki efek yang signifikan bagi manajemen dalam menyediakan lebih banyak pelaporan dan kualitas pelaporan perusahaan, termasuk laporan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Rouf (2011), Said dkk. (2009), yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Menurut Said dkk. (2009) tanggung jawab komite audit yang meliputi *review* departemen audit internal, mengulas rencana audit tahunan, meninjau laporan keuangan triwulan dan akhir tahun, berfokus pada perubahan kebijakan dan praktik akuntansi, penyesuaian signifikan yang timbul dari audit, asumsi kelangsungan perusahaan, kesesuaian dengan standar akuntansi dan peraturan hukum lainnya membuat pengawasan komite audit terhadap aktivitas perusahaan sangat ketat termasuk aktivitas *Corporate Social Responsibility* dan pengungkapannya. Dari penjelasan diatas maka menunjukkan bahwa komite audit dapat meminimalisir *agency problem* dan menekan *agent* (direksi) bertindak secara rasional untuk kepentingan pemegang saham. Menurut teori Agensi, *agent* harus menggunakan keahlian, kebijaksanaan, itikad baik, dan tingkah laku yang wajar dan adil dalam memimpin perseroan (Surya dan Yustivandana, 2006:2). Dari penjelasan

tanggung jawabnya dapat dilihat bahwa komite audit sudah memenuhi syarat sebagai mekanisme GCG karena memenuhi asas-asas GCG seperti *responsibility*, *transparancey*, *accountability* dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit menjalankan tugasnya dengan baik. Keberadaan komite audit dapat mengindikasikan kualitas pengawasan yang lebih baik dan memiliki efek yang signifikan bagi manajemen dalam menyediakan lebih banyak informasi kepada pemakai laporan keuangan (Ho dan Wong, 2001 dalam Khomsiyah, 2003). Sementara itu, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Habbash (2015) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

2. Pembahasan Hipotesis Kedua

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Komposisi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hasil ini didasari oleh hasil uji t yang menunjukkan $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ ($3,249 < 1,992$) dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,832 yang nilainya lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Haniffa dan Cooke (2002) yang menyatakan bahwa Komposisi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan Habbash (2015) yang menyatakan bahwa Komposisi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Komposisi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR perusahaan hal ini kemungkinan disebabkan karena dewan komisaris independen yang dimiliki oleh perusahaan di Indonesia tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya. Keberadaan dewan komisaris independen tidak dapat memberikan kontrol dan monitoring bagi manajemen dalam operasional perusahaan, termasuk dalam pelaksanaan dan pengungkapan aktivitas tanggung jawab sosial (Susanti dan Riharjo, 2013). Komposisi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR seperti ini dikarenakan batas minimum dewan komisaris independen hanya sebesar 30%, sehingga pengaruh yang diberikan oleh dewan komisaris independen belum cukup tinggi untuk mempengaruhi keputusan dewan komisaris.

3. Pembahasan Hipotesis Ketiga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Komposisi Kepemilikan Institusi tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hasil ini didasari oleh hasil uji t yang menunjukkan $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ ($1,702 < 1,992$) dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,093 yang nilainya lebih besar dari 0,05.. Hal ini berarti Komposisi Kepemilikan Institusi yang tinggi menimbulkan kepemilikan yang terkonsentrasi, dan hanya ingin memaksimalkan harga saham yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan manajer dan juga mengesampingkan aktivitas perusahaan yang lain termasuk CSR.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Priandita (2011) yang menyatakan bahwa Komposisi Kepemilikan Institusi tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Priandita (2011) menyatakan bahwa kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, dikarenakan institusi lebih condong untuk memaksimalkan harga saham. Indikasi pemilik institusional lebih condong ke harga saham membuat kurangnya tanggung jawab penuh sebagai pemegang saham dan hanya menjalankan tanggung jawab yang akan memaksimalkan harga saham saja. Tindakan tidak sesuai dengan teori Agensi yang menyatakan harus ada keselarasan antara pemegang saham dan manajer. Sementara itu, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Rustiarini (2011) hubungan antara kepemilikan institusional umumnya untuk melindungi hak dan kepentingan pemegang saham sehingga otomatis pihak tersebut menuntut perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara transparan, sehingga kepemilikan institusional dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan sukarela. Di samping itu, pemegang saham institusi melakukan tekanan terhadap perusahaan untuk melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* agar mendapat citra yang baik dari lingkungan sekitar.

4. Pembahasan Hipotesis Keempat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Komposisi Kepemilikan Asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social*

Responsibility. Hasil ini didasari oleh hasil uji regresi dimana nilai koefisien regresi 0,139 dan uji t yang menunjukkan hasil t hitung $> t$ tabel ($5,664 > 1,992$) dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 yang nilainya lebih kecil dari 0,05.. Komposisi Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility*. Hal ini berarti Komposisi Kepemilikan Asing yang cukup besar menunjukkan akuntabilitas pemilik asing dan tanggung jawab mereka yang sesuai dengan teori Agensi karena mereka dapat menjadi jembatan antara investor dan manajer, yang membuat timbulnya kepuasan dari pemegang saham lainnya dan juga kepuasan manajer. Tindakan tersebut akan berdampak positif terhadap aktivitas perusahaan termasuk CSR.

Hasil ini selaras dengan penelitian Haniffa dan Cooke (2005) yang menyatakan bahwa Komposisi Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Menurut Haniffa dan Cooke (2005) bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan yang memiliki pemegang saham asing sebagai strategi proaktif untuk mendapatkan aliran lanjutan dari modal dan juga untuk menyenangkan para investor. Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pemegang saham asing memberikan tekanan yang lebih kepada perusahaan untuk melakukan CSR dan mengungkapkannya sebagai strategi untuk membuat kelangsungan perusahaan tetap hidup. Seperti diketahui, negara-negara di Eropa sangat memperhatikan isu sosial misalnya hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja, dan lingkungan seperti efek rumah kaca, pembalakan liar, serta

pencemaran air (Rustiarini, 2011). Perusahaan yang terdapat kepemilikan asing cenderung mengungkapkan tanggung jawab sosial lebih luas. Hal ini disebabkan beberapa alasan. Pertama, perusahaan asing terutama di Eropa dan Amerika lebih mengenal konsep praktik dan pengungkapan CSR. Kedua, perusahaan asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik dalam bidang akuntansi dari perusahaan induk luar negeri. Ketiga, perusahaan tersebut mungkin mempunyai sistem informasi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan perusahaan induk. Keempat, kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing dari pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum (Rosmasita, 2007 dalam Wibowo, 2013). Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Struktur kepemilikan berarti struktur kepemilikan asing juga termasuk didalamnya. Dalam penelitian Tanimoto dan Suzuki (2005) membuktikan bahwa kepemilikan asing pada perusahaan publik di Jepang menjadi faktor pendorong terhadap adopsi GRI dalam pengungkapan tanggung jawab sosial. Berhubung pengungkapan CSR di Indonesia menggunakan pedoman GRI, maka dengan kata lain kepemilikan asing berpengaruh dengan pengungkapan CSR di Indonesia. Sementara itu, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Machmud dan Djakman (2008) dalam Febrina (2011) menyatakan bahwa alasan adanya kepemilikan asing dalam perusahaan di Indonesia tidak meningkatkan indeks GRI sebagai ukuran pengungkapan CSR, adanya kemungkinan jika kepemilikan asing ini

dikonsolidasikan dengan perusahaan induk di negara asal mereka maka persentase kepemilikan tersebut sangat kecil, sehingga mereka menjadi kurang memperhatikan pengungkapan CSR sebagai suatu hal yang penting untuk diungkapkan ke publik.

5. Pembahasan Hipotesis Kelima

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Komposisi Kepemilikan Publik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hasil ini didasari oleh hasil uji regresi dimana dimana hasil nilai koefisien regresi sebesar -0,148 dan uji t yang menunjukkan hasil $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-3,055 < 1,992$) dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,003 yang nilainya lebih kecil dari 0,05.. Komposisi Kepemilikan Publik berpengaruh negatif terhadap *Corporate Social Responsibility*. Cahaya (2008) melakukan penelitian dan menyatakan bahwa Tingkat Pengungkapan CSR di Indonesia berada di angka 14,5 %, hal ini berarti bahwa praktik pengungkapan CSR di Indonesia masih rendah. Kemungkinan hal ini terjadi karena publik sebagai investor yang ingin menanamkan modalnya pada perusahaan tidak memperhatikan Tingkat Pengungkapan CSR pada perusahaan tersebut dan lebih mementingkan pergerakan harga saham. Hal ini terjadi dikarenakan kesadaran publik yang masih kurang terhadap CSR. Publik sebagai investor lebih mementingkan pergerakan harga saham karena mereka ingin mendapatkan *return* sebesar-besarnya dari investasi yang mereka lakukan. Sehingga tinggi atau rendahnya Tingkat Pengungkapan CSR tidak mempengaruhi mereka dalam pengambilan keputusan investasi.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Rivi dan Hasan (2011) yang menyatakan bahwa rasio kepemilikan publik yang tinggi diprediksikan perusahaan akan melakukan Tingkat Pengungkapan social yang lebih, hal ini dikaitkan dengan tekanan dari pemegang saham, agar perusahaan lebih memperhatikan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Akan tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur dan Priantinah (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Rahma dan Indah (2010) dalam Nur dan Priantinah (2012) menyatakan bahwa alasan yang dapat digunakan untuk menjelaskan penelitian ini adalah kemungkinan kepemilikan publik pada perusahaan di Indonesia secara umum belum memperdulikan masalah lingkungan dan sosial sebagai isu kritis yang harus secara ekstensif untuk diungkapkan dalam laporan tahunan.

6. Pembahasan Hipotesis Keenam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran Komite Audit, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Komposisi Kepemilikan Institusi, Komposisi Kepemilikan Asing, dan Komposisi Kepemilikan Publik berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan CSR. Hasil ini berdasarkan hasil uji F yang menunjukkan bahwa F hitung sebesar 16,802 jika dibandingkan dengan F tabel pada tingkat signifikansi 0,05 yaitu 2,345 maka nilai F hitung lebih besar dari f tabel ($16,802 > 2,345$). Nilai probabilitas sebesar 0,000 yang nilainya jauh lebih kecil dari 0,05.

Menurut Habbash (2015) komite audit yang efektif bisa menjadi alat pengawasan yang sukses untuk keputusan manajer, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial bisnis, yang akan tercermin dalam pengungkapan CSR berkualitas tinggi. Dengan penjelasan diatas maka menunjukkan bahwa komite audit dapat meminimalisir *agency problem* dan menekan *agent* (direksi) bertindak secara rasional untuk kepentingan prinsipalnya (pemegang saham).

Keberadaan dewan komisaris independen akan menambah efektifitas pengawasan. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat ketentuan yang mengatur tentang keberadaan dewan komisaris independen. Ketentuan yang dimaksud adalah peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-A tanggal 14 Juli tahun 2004. Kriteria komisaris independen dapat mendukung aktivitas perusahaan untuk berjalan lebih baik, mengontrol kecurangan di setiap aktivitas perusahaan dengan tujuan menciptakan keseimbangan kepentingan berbagai pihak (Surya dan Yustivandana, 2006:139). Dengan kata lain komisaris independen dapat mempengaruhi aktivitas CSR dan pengungkapannya karena aktivitas CSR otomatis terpantau oleh komisaris independen, karena komisaris independen berpegang pada prinsip keseimbangan kepentingan berbagai pihak maka komisaris independen ingin memaksimalkan hasil dari kegiatan CSR agar memberikan kepuasan kepada pihak yang berkepentingan terhadap CSR.

Keaktifan pemegang saham institusional dalam mengambil keputusan membuat mereka lebih protektif dengan segala kegiatan perusahaan dengan tujuan

agar keputusan yang mereka ambil lebih akurat. Kepemilikan oleh institusi dapat meningkatkan pengendalian terhadap manajemen dan mengurangi peluang tindak kecurangan yang mungkin dilakukan (Murwaningsari, 2009). Institusi secara profesional akan memantau perkembangan investasinya agar dapat menghasilkan keuntungan yang ingin mereka capai. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen.

Pengungkapan CSR merupakan salah satu media yang dipilih untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya. Pemegang saham asing berusaha mendapat legitimasi dari lingkungan sekitar dengan tujuan agar perusahaan tetap dapat eksis di lingkungan sekitar. Pemegang saham asing pasti mendapat intervensi lebih dari lingkungan sekitar karena mereka bukan dari kalangan negara tempat perusahaan berada. Sebagai pihak yang concern terhadap aktivitas perusahaan berarti pemilik asing bertanggungjawab atas perusahaan dimana dia memiliki saham disana. Keahlian dalam sistem informasi dan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi mengindikasikan kepemilikan asing akan mengurangi *agency cost* yang dijelaskan dalam teori Agensi dikarenakan pemilik asing sebagai prinsipal bisa lebih bijaksana dalam menyatukan tujuannya dengan agen (manajer) dalam setiap aktivitas perusahaan.

Menurut Hadi dan Sabeni (2002), kepemilikan saham publik juga dapat mempengaruhi Tingkat Pengungkapan CSR. Dengan adanya kepemilikan publik, maka perusahaan harus menyajikan laporan tahunan perusahaan kepada publik untuk menjaga kepercayaan investor publik terhadap perusahaan. Melalui laporan keuangan perusahaan para investor akan menganalisis kinerja perusahaan dan kondisi perusahaan di masa yang akan datang untuk menjadi pertimbangan dalam investasinya. Agar investor mau melakukan investasi pada perusahaan, maka perusahaan harus menampilkan keunggulan perusahaan yang salah satu caranya adalah mengungkapkan *Corporate Social Responsibility*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah *Good Corporate Governance* yaitu komite audit, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Komposisi Kepemilikan Institusional, Komposisi Kepemilikan Asing dan Komposisi Kepemilikan Publik mempengaruhi Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2014. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial Ukuran Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan CSR perusahaan. Semakin besar jumlah anggota komite audit maka semakin luas pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan. Keberadaan komite audit dapat mengindikasikan kualitas pengawasan yang lebih baik dan memiliki efek yang signifikan bagi manajemen dalam menyediakan lebih banyak pelaporan dan kualitas pelaporan perusahaan, termasuk laporan pengungkapan *corporate social responsibility*.
2. Secara parsial Komposisi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan CSR perusahaan. Komposisi Dewan

Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR perusahaan hal ini kemungkinan disebabkan karena Dewan Komisaris Independen yang dimiliki oleh perusahaan di Indonesia tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya. Keberadaan dewan komisaris independen tidak dapat memberikan kontrol dan monitoring bagi manajemen dalam operasional perusahaan, termasuk dalam pelaksanaan dan pengungkapan aktivitas tanggung jawab social.

3. Secara parsial Komposisi Kepemilikan Institusi tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan CSR perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Saham Institusional di suatu perusahaan tidak bisa dijadikan dasar bahwa perusahaan akan mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* secara luas dikarenakan pemegang saham institusional hanya memikirkan laba perusahaan.
4. Secara parsial Komposisi Kepemilikan Asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan CSR perusahaan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi jumlah saham yang dimiliki pihak asing di perusahaan maka mendorong perusahaan melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* lebih luas. Komposisi Kepemilikan Asing yang cukup besar menunjukkan akuntabilitas pemilik asing dan tanggung jawab mereka yang sesuai dengan teori Agensi karena mereka dapat menjadi jembatan antara investor dan manajer, yang membuat timbulnya kepuasan dari

pemegang saham lainnya dan juga kepuasan manajer. Dari tindakan tersebut maka akan berdampak positif terhadap aktivitas perusahaan termasuk CSR.

5. Secara parsial Komposisi Kepemilikan Publik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan CSR perusahaan. Kemungkinan hal ini terjadi karena publik sebagai investor yang ingin menanamkan modalnya pada perusahaan tidak memperhatikan Tingkat Pengungkapan CSR pada perusahaan tersebut dan lebih mementingkan pergerakan harga saham. Hal ini terjadi dikarenakan kesadaran publik yang masih kurang terhadap CSR. Publik sebagai investor lebih mementingkan pergerakan harga saham karena mereka ingin mendapatkan return sebesar-besarnya dari investasi yang mereka lakukan. Sehingga tinggi atau rendahnya Tingkat Pengungkapan CSR tidak mempengaruhi mereka dalam pengambilan keputusan investasi.
6. Secara bersama - sama Ukuran Komite Audit, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Komposisi Kepemilikan Institusi Komposisi Kepemilikan Asing dan Komposisi Kepemilikan Publik, berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan CSR. Komite Audit yang efektif bisa menjadi alat pengawasan yang sukses untuk keputusan manajer, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial bisnis, yang akan tercermin dalam pengungkapan CSR berkualitas tinggi. Kriteria Dewan Komisaris Independen dapat mendukung aktivitas perusahaan untuk berjalan lebih baik, mengontrol kecurangan di setiap aktivitas perusahaan dengan tujuan menciptakan keseimbangan kepentingan berbagai pihak. Adanya kepemilikan institusional

di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pemegang saham asing berusaha mendapat legitimasi dari lingkungan sekitar dengan tujuan agar perusahaan tetap dapat eksis di lingkungan sekitar. Pemegang saham asing pasti mendapat intervensi lebih dari lingkungan sekitar karena mereka bukan dari kalangan negara tempat perusahaan berada. Sebagai pihak yang *concern* terhadap aktivitas perusahaan berarti pemilik asing bertanggungjawab atas perusahaan dimana dia memiliki saham disana. Dengan adanya kepemilikan publik, maka perusahaan harus menyajikan laporan tahunan perusahaan kepada publik untuk menjaga kepercayaan investor publik terhadap perusahaan. Agar investor mau melakukan investasi pada perusahaan, maka perusahaan harus menampilkan keunggulan perusahaan yang salah satu caranya adalah mengungkapkan *Corporate Social Responsibility*.

B. Saran

1. Bagi penelitian yang akan datang sebaiknya menggunakan sampel yang lebih luas seperti sektor manufaktur, asuransi, perbankan dan lain-lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi penelitian yang akan datang sebaiknya menggunakan sampel perusahaan yang lebih banyak dan rentang waktu yang lebih lama agar diperoleh hasil yang lebih akurat.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel independen yang digunakan seperti komposisi kepemilikan manajerial, kepemilikan keluarga dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. N. (2011). Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di BEI). *Skripsi S1 Universitas Diponegoro*.
- Alfia, R. P. (2013). Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility dalam Sustainability Report (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2011). *Skripsi S1 Universitas Diponegoro*.
- Anthony, N. R., dan Govindarajan V. (2011). *Sistem Pengendalian Manajemen Ed 12, Jilid 2*. Karishma Publishing Group. Tangerang Selatan.
- Aryanti, Risma D. (2013). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Opini Audit Going Concern pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Skripsi S1 Universitas Islam Indonesia*.
- Bhattacharya, C. B., Korschun, D., dan Sen, S. (2009). Strengthening Stakeholder-Company Relationships Through Mutually Beneficial Corporate Social Responsibility Initiatives. *Journal of Business Ethics*, 85(SUPPL. 2), 257–272.
- Cahaya, F. R., Porter, S. A., Brown, A. M., Isack, I., Chyi, R., dan Tan, W. (2008). Centre for Environmental Accountability. *Journal of the Asia-Pacific Centre for Environmental Accountability*, 14(1), 2–11.
- Esa, E., Anum, N., dan Ghazali, M. (2012). Corporate Social Responsibility and Corporate Governance in Malaysian Government-linked Companies, *Journal of Corporate Governance*, 12(3), 292–305.
- Farooque, O. A., Ziji, T. v., Keitha, D., dan AKM, W. K. (2007). Corporate Governance in Bangladesh: Link between Ownership and Financial Performance, Blackwell Publishing Ltd, *Journal Compilation*, 15(6), 1453-1468.
- FCGI. (2001). Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan). Diakses pada 23 Februari 2016, pada: <https://muhariefeffendi.files.wordpress.com/2009/12/fcgiselfassessmentchecklist.pdf>.
- Febrina, D. (2011). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Profitabilitas, *Leverage*, Likuiditas, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi Empiris pada

Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014).
Skripsi S1 Universitas Islam Indonesia.

Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: BP UNDIP.

GRI. (2013). Global Reporting Initiatives. Diambil dari <http://www.globalreporting.org> pada tanggal 25 Januari 2016.

Habbash, M. (2015). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure : Evidence from Saudi Arabia. *Journal of Social Responsibility*, 10(9), 267–283.

Hadi, Nor. (2011). “*Corporate Social Responsibility (CSR)*”. *Edisi 1*. Jakarta: Graha Ilmu.

Haniffa, R. M., dan Cooke, T. E. (2005). The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(5), 391–430.

Hapsoro, D. (2012). Pengaruh Corporate Governance dan Kualitas Audit terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Journal of Social Responsibility*, 23(3), 199–215.

Ikatan Akuntansi Indonesia. (1998). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 1998). Jakarta: Salemba Empat.

Jaffar, R., Hassan, M. S., dan Muhamad. N. (2010). Peranan Etika dalam Pelaporan Maklumat Alam Sekitar di Malaysia. *Jurnal Pengurusan*, 31(1), 13–27.

Jensen, M. C., dan Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.

Jizi, M. I., Salama, A., Dixon, R., dan Stratling, R. (2014). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence from the US Banking Sector. *Journal of Business Ethics*, 125(4), 601–615.

KNKG. (2006). Pedoman umum good Corporate Governance. Diakses pada 25 Januari 2016, dari: www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/info_pm/Pedoman%20GCG%20Indonesia%202006.pdf.

Manurung, D. E. M. (2012). Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT. Perkebunan Nusantara IV-Medan. *Tesis S2 Universitas*

Indonesia.

- Murwaningsari, E. (2009). Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities dan Corporate Financial Performance dalam Satu Continuum. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 1(1), 1-45.
- Murwaningsari, E., dan Pradhana, E. P. M. (2014). Pengaruh Market Power dan Corporate Governance terhadap Future Earnings Response Coefficient pada Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 15(1), 1-19.
- Nor Hadi dan Arifin Sabeni. “Analisis FaktorFaktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan di BEJ”. *Jurnal Maksi* Vol.1/Agustus/2002. PP. 90-104.
- Nur, M, dan Priantinah, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan Berkategori High Profile yang Listing di Bursa Efek Indonesia). *Journal Nominal*, 1(1), 22-34.
- Oh, Y., Yong, W., dan Chang, K. (2011). The Effect of Ownership Structure on Corporate Social Responsibility : Empirical Evidence from Korea. *Journal of Business Ethics*, 104(6), 283–297.
- Prabudi, I. M., dan Suana, I. W. (2015). Loyalitas Karyawan terhadap Prestasi Kerja. *Journal of Business Ethics*, 8(1), 192–208.
- Priandita, I. A. (2011). Determinan Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Skripsi S1 Universitas Islam Indonesia*.
- Puspitasari, Apriani Daning., 2009. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Laporan Tahunan Perusahaan Di Indonesia. *Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang*.
- Rouf, M. D. (2011). An Empirical Investigation into Corporate Voluntary Disclosure of Management’s Responsibilities in the Bangladeshi Listed Companies. *ASA University Review*, 5(1), 261-274.
- Rustiarini, W. N. (2011). Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. 1-24.
- Said, R., Hj Zainuddin, Y., dan Haron, H. (2009). The Relationship Between Corporate Social Responsibility Disclosure and Corporate Governance Characteristics in Malaysian Public Listed Companies. *Social Responsibility*

Journal, 5(2), 212–226.

Susanti, S., dan Riharjo, I. B. (2013). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Cosmetics and Household. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1(1), 152-167.

Shleifer, A., dan Vishny, R. W. (1997). A Survey of Corporate Governance. *Journal of Corporate Governance*, 52(2), 737–783.

Sinaga, A. M. (2011). Pengaruh Elemen Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Pelaporan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Sektor Perbankan Di Indonesia. *Skripsi S1 Universitas Diponegoro*.

Supranto, J. (2001). *Statistik, Teori dan Aplikasi. Edisi Keenam. Jilid Kedua*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Surya, I., dan Yustivandana, I. (2006). Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha. Jakarta: Kencana.

Susanti, S., dan Riharjo, I. B. (2013). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Cosmetics and Household. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1(1), 152-167.

Tuan, L. T. (2012). Corporate Social Responsibility, Ethics, and Corporate Governance. *Social Responsibility Journal*, 8(4), 547–560.

Wibowo, P. R. E. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010. *Skripsi S1 Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR SAMPEL PERUSAHAAN SEKTOR TAMBANG YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2014

NO	KODE PERUSAHAAN	NAMA PERUSAHAAN
1	ITMG	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
2	BSSR	PT Baramulti Suksessarana Tbk
3	ARII	PT Atlas Resources Tbk
4	ATPK	PT ATPK Resources Tbk
5	BRAU	PT Berau Coal Energy Tbk
6	BUMI	PT BUMI Resources Tbk
7	BYAN	PT Bayan Resources Tbk
8	DEWA	PT Darma Henwa Tbk
9	DOID	PT Delta Dunia Makmur Tbk
10	GEMS	PT Golden Energy Mines Tbk
11	GTBO	PT Garda Tujuh Buana
12	HRUM	PT Harum Energy Tbk
13	KKGI	PT Resources Alam Indonesia Tbk
14	BORN	PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk
15	MYOH	PT Samindo Resource Tbk
16	PTBA	PT Bukit Asam Tbk
17	PTRO	PT Petrosea Tbk
18	SMMT	PT Golden Eagle Energy Tbk
19	TOBA	PT Toba Bara Sejahtera Tbk
20	CTTH	PT Citatah Tbk
21	MITI	PT Mitra Investindo Tbk
22	TINS	PT Timah Tbk
23	ANTM	PT Aneka Tambang Tbk
24	CITA	PT Cita Mineral Investindo Tbk
25	CKRA	PT Cakra Mineral Tbk
26	DKFT	PT Central Omega Resources
27	INCO	PT Vale Indonesia Tbk
28	PSAB	PT J Resources Asia Pasifik Tbk
29	SMRU	PT SMR Utama Tbk
30	MEDC	PT Medco Energi Internasional Tbk

31	ARTI	PT Ratu Prabu Energi Tbk
32	ELSA	PT Elnusa Tbk
33	ENRG	PT Energi Mega Persada Tbk
34	ESSA	PT Surya Esa Pekasa Tbk
35	RUIS	PT Radiant Utama Interisco
36	ADRO	PT Adaro Energy Tbk
37	BIPI	PT Benakat Petroleum Energy Tbk
38	APEX	PT Apexindo Pratama Duta Tbk

Lampiran 2

DATA TINGKAT PENGUNGKAPAN CSR

1. Data Tingkat Pengungkapan CSR Tahun 2013

No	Kode Emiten	CSRD	CSRi	Tingkat Pengungkapan CSR
1	ITMG	42	91	0,462
2	BSSR	32	91	0,352
3	ARII	25	91	0,275
4	ATPK	23	91	0,253
5	BRAU	39	91	0,429
6	BUMI	33	91	0,363
7	BYAN	29	91	0,319
8	DEWA	29	91	0,319
9	DOID	31	91	0,341
10	GEMS	41	91	0,451
11	GTBO	28	91	0,308
12	HRUM	25	91	0,275
13	KKGI	33	91	0,363
14	BORN	26	91	0,286
15	MYOH	43	91	0,473
16	PTBA	33	91	0,363
17	PTRO	29	91	0,319
18	SMMT	30	91	0,33
19	TOBA	39	91	0,429
20	CTTH	26	91	0,286
21	MITI	38	91	0,418
22	TINS	31	91	0,341
23	ANTM	50	91	0,549
24	CITA	41	91	0,451
25	CKRA	45	91	0,495
26	DKFT	25	91	0,275
27	INCO	42	91	0,462
28	PSAB	44	91	0,484

29	SMRU	30	91	0,33
30	MEDC	32	91	0,352
31	ARTI	35	91	0,385
32	ELSA	34	91	0,374
33	ENRG	25	91	0,275
34	ESSA	25	91	0,275
35	RUIS	27	91	0,297
36	ADRO	39	91	0,429
37	BIPI	31	91	0,341
38	APEX	40	91	0,440

2. Data Tingkat Pengungkapan CSR Tahun 2014

No	Kode Emiten	CSRD	CSRi	Tingkat Pengungkapan CSR
1	ITMG	49	91	0,538
2	ADRO	39	91	0,429
3	ARII	27	91	0,297
4	ATPK	23	91	0,253
5	BRAU	44	91	0,484
6	BUMI	40	91	0,44
7	BYAN	29	91	0,319
8	DEWA	29	91	0,319
9	DOID	34	91	0,374
10	GEMS	41	91	0,451
11	GTBO	28	91	0,308
12	HRUM	29	91	0,319
13	KKGI	33	91	0,363
14	BORN	30	91	0,33
15	MYOH	43	91	0,473
16	PTBA	37	91	0,407
17	PTRO	29	91	0,319
18	SMMT	30	91	0,33
19	TOBA	43	91	0,473
20	CTTH	26	91	0,286

21	MITI	38	91	0,418
22	TINS	32	91	0,352
23	ANTM	50	91	0,549
24	CITA	39	91	0,429
25	CKRA	45	91	0,495
26	DKFT	25	91	0,275
27	INCO	42	91	0,462
28	PSAB	44	91	0,484
29	SMRU	30	91	0,33
30	MEDC	41	91	0,451
31	ARTI	27	91	0,297
32	ELSA	34	91	0,374
33	ENRG	25	91	0,275
34	ESSA	27	91	0,297
35	RUIS	28	91	0,308
36	BIPI	34	91	0,374
37	BSSR	38	91	0,418
38	APEX	47	91	0,516

Lampiran 3

DATA KOMITE AUDIT

1. Data Komite Audit Tahun 2013

No	Kode Emiten	Komite Audit
1	ITMG	3
2	BSSR	3
3	ARII	3
4	ATPK	3
5	BRAU	3
6	BUMI	3
7	BYAN	3
8	DEWA	3
9	DOID	3
10	GEMS	3
11	GTBO	3
12	HRUM	3
13	KKGI	3
14	BORN	2
15	MYOH	3
16	PTBA	4
17	PTRO	3
18	SMMT	3
19	TOBA	3
20	CTTH	3
21	MITI	3
22	TINS	4
23	ANTM	6
24	CITA	3
25	CKRA	3
26	DKFT	3
27	INCO	3

28	PSAB	3
29	SMRU	3
30	MEDC	3
31	ARTI	2
32	ELSA	4
33	ENRG	3
34	ESSA	3
35	RUIS	3
36	ADRO	3
37	BIPI	3
38	APEX	3

2. Data Komite Audit Tahun 2014

No	Kode Emiten	Komite Audit
1	ITMG	3
2	ADRO	3
3	ARII	2
4	ATPK	3
5	BRAU	3
6	BUMI	3
7	BYAN	1
8	DEWA	3
9	DOID	3
10	GEMS	3
11	GTBO	3
12	HRUM	3
13	KKGI	3
14	BORN	2
15	MYOH	3
16	PTBA	4
17	PTRO	3
18	SMMT	3

19	TOBA	3
20	CTTH	3
21	MITI	3
22	TINS	4
23	ANTM	6
24	CITA	3
25	CKRA	3
26	DKFT	3
27	INCO	3
28	PSAB	3
29	SMRU	3
30	MEDC	3
31	ARTI	2
32	ELSA	4
33	ENRG	3
34	ESSA	3
35	RUIS	3
36	BIPI	3
37	BSSR	3
38	APEX	3

Lampiran 4

DATA KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN

1. Data Komposisi Dewan Komisaris Independen Tahun 2013

No	Kode Emiten	ADKI	ADK	KDKI
1	ITMG	2	6	0,333
2	BSSR	2	6	0,333
3	ARII	3	6	0,500
4	ATPK	1	3	0,333
5	BRAU	3	6	0,500
6	BUMI	4	7	0,571
7	BYAN	2	6	0,333
8	DEWA	2	5	0,400
9	DOID	4	8	0,500
10	GEMS	3	5	0,600
11	GTBO	1	3	0,333
12	HRUM	2	5	0,400
13	KKGI	2	5	0,400
14	BORN	2	3	0,667
15	MYOH	1	3	0,333
16	PTBA	3	6	0,500
17	PTRO	3	7	0,429
18	SMMT	3	5	0,600
19	TOBA	2	3	0,667
20	CTTH	1	3	0,333
21	MITI	2	4	0,500
22	TINS	3	6	0,500
23	ANTM	2	6	0,333
24	CITA	1	2	0,500
25	CKRA	1	2	0,500
26	DKFT	1	3	0,333
27	INCO	3	10	0,300
28	PSAB	1	3	0,333
29	SMRU	1	2	0,500

30	MEDC	3	6	0,500
31	ARTI	1	2	0,500
32	ELSA	2	5	0,400
33	ENRG	2	4	0,500
34	ESSA	2	4	0,500
35	RUIS	1	3	0,333
36	ADRO	2	5	0,400
37	BIPI	2	4	0,500
38	APEX	2	3	0,667

2. Data Komposisi Dewan Komisaris Independen Tahun 2014

No	Kode Emiten	ADKI	ADK	KDKI
1	ITMG	2	6	0,333
2	ADRO	2	5	0,400
3	ARII	2	6	0,333
4	ATPK	1	3	0,333
5	BRAU	2	4	0,500
6	BUMI	4	7	0,571
7	BYAN	2	5	0,400
8	DEWA	2	5	0,400
9	DOID	4	6	0,667
10	GEMS	2	5	0,400
11	GTBO	1	3	0,333
12	HRUM	2	5	0,400
13	KKGI	2	5	0,400
14	BORN	1	3	0,333
15	MYOH	1	3	0,333
16	PTBA	2	6	0,333
17	PTRO	2	5	0,400
18	SMMT	3	5	0,600
19	TOBA	2	3	0,667
20	CTTH	1	3	0,333
21	MITI	2	5	0,400
22	TINS	2	6	0,333

23	ANTM	2	6	0,333
24	CITA	1	3	0,333
25	CKRA	1	2	0,500
26	DKFT	1	3	0,333
27	INCO	3	10	0,300
28	PSAB	1	3	0,333
29	SMRU	1	2	0,500
30	MEDC	2	6	0,333
31	ARTI	1	2	0,500
32	ELSA	2	5	0,400
33	ENRG	2	4	0,500
34	ESSA	2	4	0,500
35	RUIS	1	3	0,333
36	BIPI	2	4	0,500
37	BSSR	1	7	0,143
38	APEX	2	3	0,667

Lampiran 5

DATA KOMPOSISI KEPEMILIKAN INSTITUSI

1. Data Komposisi Kepemilikan Institusi Tahun 2013

No	Kode Emiten	JSI	JSB	KKI
1	ITMG	807.105.428	1.129.925.000	0,333
2	BSSR	680.290.000	2.616.500.000	0,333
3	ARII	2.185.798.000	3.000.000.000	0,5
4	ATPK	4.763.557.884	5.760.245.414	0,333
5	BRAU	29.573.999.404	34.900.000.000	0,5
6	BUMI	8.374.603.988	20.733.400.000	0,571
7	BYAN	1.000.000.500	3.333.333.500	0,333
8	DEWA	10.585.792.350	21.857.923.497	0,4
9	DOID	3.264.000.000	8.216.846.232	0,5
10	GEMS	5.705.882.500	5.882.353.000	0,6
11	GTBO	1.512.235.000	2.500.000.000	0,333
12	HRUM	1.911.958.500	2.703.620.000	0,4
13	KKGI	825.875.087	1.000.000.000	0,4
14	BORN	10.745.093.448	17.693.000.000	0,667
15	MYOH	1.637.771.359	2.206.312.500	0,333
16	PTBA	617.199.364	2.304.131.850	0,5
17	PTRO	792.868.107	1.008.605.000	0,429
18	SMMT	751.230.000	900.000.000	0,6
19	TOBA	1.874.455.000	2.012.500.000	0,667
20	CTTH	642.704.540	1.230.839.821	0,333
21	MITI	1.281.886.829	2.566.456.000	0,5
22	TINS	1.615.599.420	5.033.020.000	0,5
23	ANTM	1.993.538.462	9.538.461.538	0,333
24	CITA	3.264.761.380	3.370.734.900	0,5
25	CKRA	4.742.010.683	5.106.021.090	0,5
26	DKFT	4.235.964.485	5.612.355.730	0,333
27	INCO	7.900.382.916	9.936.338.720	0,3
28	PSAB	715.155.798	756.000.000	0,333
29	SMRU	920.000.000	1.500.000.000	0,5

30	MEDC	1.689.393.006	3.332.451.450	0,5
31	ARTI	1.275.527.512	1.568.000.000	0,5
32	ELSA	5.078.917.890	7.298.500.000	0,4
33	ENRG	9.990.998.369	44.642.530.693	0,5
34	ESSA	64.999.000.000	110.000.000.000	0,5
35	RUIS	274.398.500	770.000.000	0,333
36	ADRO	24.601.085.748	31.986.849.237	0,4
37	BIPI	14.917.238.268	36.508.170.014	0,5
38	APEX	223.722.254	254.806.854	0,667

2. Data Komposisi Kepemilikan Institusi Tahun 2014

No	Kode Emiten	JSI	JSB	KKI
1	ITMG	1.086.365.344	1.129.925.000	0,961
2	ADRO	17.157.270.017	31.985.962.000	0,536
3	ARII	2.185.798.000	3.000.000.000	0,729
4	ATPK	4.763.557.884	5.760.245.414	0,827
5	BRAU	29.573.999.404	34.900.000.000	0,847
6	BUMI	8.374.603.988	20.733.400.000	0,404
7	BYAN	1.000.000.500	3.333.333.500	0,3
8	DEWA	8.918.508.761	21.853.733.792	0,408
9	DOID	3.264.000.000	8.245.228.732	0,396
10	GEMS	5.705.882.500	5.882.353.000	0,97
11	GTBO	2.429.750.000	2.500.000.000	0,972
12	HRUM	1.911.985.500	2.703.620.000	0,707
13	KKGI	568.878.000	1.000.000.000	0,569
14	BORN	10.745.093.448	17.693.000.000	0,607
15	MYOH	1.637.771.359	2.206.312.500	0,742
16	PTBA	617.199.364	2.304.131.850	0,268
17	PTRO	792.868.107	1.008.605.000	0,786
18	SMMT	2.617.378.603	3.150.000.000	0,831
19	TOBA	1.874.455.000	2.012.500.000	0,931
20	CTTH	642.704.540	1.230.839.821	0,522
21	MITI	965.456.328	1.283.228.000	0,752
22	TINS	1.969.329.069	7.447.753.454	0,264

23	ANTM	1.993.538.462	9.538.461.538	0,209
24	CITA	3.264.761.380	3.370.734.900	0,969
25	CKRA	4.941.726.136	5.106.021.090	0,968
26	DKFT	4.239.754.485	5.631.264.665	0,753
27	INCO	8.355.180.829	9.936.338.720	0,841
28	PSAB	4.900.250.588	5.292.000.000	0,926
29	SMRU	8.564.662.352	12.000.000.000	0,714
30	MEDC	2.325.465.056	3.342.100.000	0,696
31	ARTI	1.275.527.512	1.568.000.000	0,813
32	ELSA	3.652.703.300	7.298.500.000	0,5
33	ENRG	9.990.998.369	44.642.530.693	0,224
34	ESSA	650.000.000	1.100.000.000	0,591
35	RUIS	307.400.800	770.000.000	0,399
36	BIPI	16.333.755.264	36.508.170.014	0,447
37	BSSR	680.290.000	2.616.500.000	0,26
38	APEX	362.401.904	396.521.359	0,914

Lampiran 6

DATA KOMPOSISI KEPEMILIKAN ASING

1. Data Komposisi Kepemilikan Asing Tahun 2013

No	Kode Emiten	JSA	JSB	KKA
1	ITMG	1.021.958.489	1.129.925.000	0,904
2	BSSR	680.290.000	2.616.500.000	0,26
3	ARII	678.873.500	3.000.000.000	0,226
4	ATPK	362.006.000	5.760.245.414	0,063
5	BRAU	29.573.999.404	34.900.000.000	0,847
6	BUMI	7.347.004.500	20.733.400.000	0,354
7	BYAN	1.000.000.500	3.333.333.500	0,3
8	DEWA	9.165.084.203	21.857.923.497	0,419
9	DOID	3.264.000.000	8.216.846.232	0,397
10	GEMS	1.764.706.000	5.882.353.000	0,3
11	GTBO	846.984.000	2.500.000.000	0,339
12	HRUM	-	2.703.620.000	0
13	KKGI	798.291.041	1.000.000.000	0,798
14	BORN	-	17.693.000.000	0
15	MYOH	1.637.771.359	2.206.312.500	0,742
16	PTBA	317.051.679	2.304.131.850	0,138
17	PTRO	87.464.965	1.008.605.000	0,087
18	SMMT	564.477.996	900.000.000	0,627
19	TOBA	-	2.012.500.000	0
20	CTTH	571.241.866	1.230.839.821	0,464
21	MITI	1.001.591.631	2.566.456.000	0,39
22	TINS	525.962.751	5.033.020.000	0,105
23	ANTM	811.275.219	9.538.461.538	0,085
24	CITA	3.038.717.512	3.370.734.900	0,901
25	CKRA	4.090.349.146	5.106.021.090	0,801
26	DKFT	1.346.965.375	5.612.355.730	0,24
27	INCO	7.900.382.916	9.936.338.720	0,795
28	PSAB	715.155.798	756.000.000	0,946
29	SMRU	120.000.000	1.500.000.000	0,08

30	MEDC	1.689.393.006	3.332.451.450	0,507
31	ARTI	-	1.568.000.000	0
32	ELSA	383.400.000	7.298.500.000	0,053
33	ENRG	11.026.705.081	44.642.530.693	0,247
34	ESSA	9.999.000.000	110.000.000.000	0,091
35	RUIS	100.044.000	770.000.000	0,13
36	ADRO	6.765.218.613	31.986.849.237	0,211
37	BIPI	5.928.926.810	36.508.170.014	0,162
38	APEX	196.596.154	254.806.854	0,772

2. Data Komposisi Kepemilikan Asing Tahun 2014

No	Kode Emiten	JSA	JSB	KKA
1	ITMG	1.021.958.489	1.129.925.000	0,904
2	ADRO	8.127.632.944	31.985.962.000	0,254
3	ARII	678.873.500	3.000.000.000	0,226
4	ATPK	359.864.500	5.760.245.414	0,062
5	BRAU	29.573.999.404	34.900.000.000	0,847
6	BUMI	12.398.796.012	20.733.400.000	0,598
7	BYAN	1.000.000.500	3.333.333.500	0,3
8	DEWA	9.165.084.203	21.853.733.792	0,419
9	DOID	3.264.000.000	8.245.228.732	0,396
10	GEMS	1.764.706.000	5.882.353.000	0,3
11	GTBO	1.774.499.000	2.500.000.000	0,71
12	HRUM	-	2.703.620.000	0
13	KKGI	648.595.500	1.000.000.000	0,649
14	BORN	-	17.693.000.000	0
15	MYOH	1.637.771.359	2.206.312.500	0,742
16	PTBA	317.051.679	2.304.131.850	0,138
17	PTRO	87.464.965	1.008.605.000	0,087
18	SMMT	1.963.746.593	3.150.000.000	0,623
19	TOBA	-	2.012.500.000	0
20	CTTH	571.241.866	1.230.839.821	0,464
21	MITI	880.863.578	1.283.228.000	0,686
22	TINS	670.651.809	7.447.753.454	0,09

23	ANTM	811.275.219	9.538.461.538	0,085
24	CITA	2.465.845.680	3.370.734.900	0,732
25	CKRA	4.941.726.136	5.106.021.090	0,968
26	DKFT	1.017.541.076	5.631.264.665	0,181
27	INCO	8.279.691.256	9.936.338.720	0,833
28	PSAB	4.900.250.588	5.292.000.000	0,926
29	SMRU	-	12.000.000.000	0
30	MEDC	2.918.214.276	3.342.100.000	0,873
31	ARTI	-	1.568.000.000	0
32	ELSA	1.340.004.600	7.298.500.000	0,184
33	ENRG	11.026.705.081	44.642.530.693	0,247
34	ESSA	100.000.000	1.100.000.000	0,091
35	RUIS	48.149.967	770.000.000	0,063
36	BIPI	7.838.304.102	36.508.170.014	0,215
37	BSSR	680.290.000	2.616.500.000	0,26
38	APEX	335.182.003	396.521.359	0,845

Lampiran 7

DATA KOMPOSISI KEPEMILIKAN PUBLIK

1. Data Komposisi Kepemilikan Publik Tahun 2013

No	Kode Emiten	JSP	JSB	KKP
1	ITMG	395.336.000	1.129.925.000	0,350
2	BSSR	2.092.307	28.468.640	0,073
3	ARII	909.413.000	3.000.000.000	0,303
4	ATPK	634.681.530	5.760.245.414	0,110
5	BRAU	5.326.000.596	34.900.000.000	0,153
6	BUMI	12.398.796.012	20.773.400.000	0,597
7	BYAN	414.942.500	3.333.333.500	0,124
8	DEWA	13.268.338.402	21.853.733.792	0,607
9	DOID	4.947.546.232	8.216.846.232	0,602
10	GEMS	176.470.500	5.882.353.000	0,030
11	GTBO	997.665.000	2.500.000.000	0,399
12	HRUM	791.386.500	2.703.620.000	0,293
13	KKGI	367.847.000	1.000.000.000	0,368
14	BORN	6.783.741.052	17.693.000.000	0,383
15	MYOH	470.198.225	2.206.312.500	0,213
16	PTBA	1.498.087.500	2.304.131.850	0,650
17	PTRO	224.731.300	1.008.605.000	0,223
18	SMMT	148.769.841	900.000.000	0,165
19	TOBA	49.681.000	2.012.491.000	0,025
20	CTTH	507.182.581	1.230.839.821	0,412
21	MITI	1.741.628.816	2.566.456.000	0,679
22	TINS	1.761.550.000	5.033.020.000	0,350
23	ANTM	3.333.434.500	9.538.459.750	0,349
24	CITA	105.973.520	3.370.734.900	0,031
25	CKRA	364.010.407	5.106.021.090	0,071
26	DKFT	1.394.564.180	5.630.528.665	0,248
27	INCO	2.036.346.880	9.936.338.720	0,205
28	PSAB	40.844.202	756.000.000	0,054
29	SMRU	58.000.000.000	150.000.000.000	0,387

30	MEDC	946.755.144	3.332.451.450	0,284
31	ARTI	233.372.594.000	784.000.000.000	0,298
32	ELSA	2.119.582.110	7.298.500.000	0,290
33	ENRG	28.123.134.190	44.642.530.693	0,630
34	ESSA	450.000.000	1.100.000.000	0,409
35	RUIS	302.243.500	770.000.000	0,393
36	ADRO	13.094.393.050	31.985.962.000	0,409
37	BIPI	21.590.698.563	36.508.170.014	0,591
38	APEX	254.806.854	2.659.850.000	0,096

2. Data Komposisi Kepemilikan Publik Tahun 2014

No	Kode Emiten	JSP	JSB	KKP
1	ITMG	394.680.000	1.129.925.000	0,349
2	ADRO	232.644.000	2.616.500.000	0,089
3	ARII	937.703.300	3.000.000.000	0,313
4	ATPK	636.823.030	5.760.245.414	0,111
5	BRAU	5.326.000.596	34.900.000.000	0,153
6	BUMI	12.398.796.012	20.773.400.000	0,597
7	BYAN	414.930.000	3.333.333.500	0,124
8	DEWA	13.268.338.402	21.853.733.792	0,607
9	DOID	4.974.928.232	8.245.228.732	0,603
10	GEMS	176.470.500	5.882.353.000	0,030
11	GTBO	997.765.000	2.500.000.000	0,399
12	HRUM	791.386.500	2.703.620.000	0,293
13	KKGI	348.134.500	1.000.000.000	0,348
14	BORN	6.783.741.052	17.693.000.000	0,383
15	MYOH	568.541.141	2.206.312.500	0,258
16	PTBA	805.984.350	2.304.131.850	0,350
17	PTRO	201.617.600	1.008.605.000	0,200
18	SMMT	523.621.397	3.150.000.000	0,166
19	TOBA	49.681.000	2.012.491.000	0,025
20	CTTH	507.185.081	1.230.839.821	0,412
21	MITI	397.849.949	1.283.228.000	0,310
22	TINS	2.606.139.114	7.447.753.454	0,350

23	ANTM	3.337.259.000	9.538.459.749	0,350
24	CITA	105.973.520	3.370.734.900	0,031
25	CKRA	164.294.954	5.106.021.090	0,032
26	DKFT	1.398.492.115	5.638.246.600	0,248
27	INCO	2.036.346.880	9.936.338.720	0,205
28	PSAB	391.749.414	5.292.000.000	0,074
29	SMRU	3.434.337.648	12.000.000.000	0,286
30	MEDC	701.575.544	3.332.451.450	0,211
31	ARTI	233.372.594.000	784.000.000.000	0,298
32	ELSA	2.998.500.000	7.298.500.000	0,411
33	ENRG	28.735.839.354	44.642.530.693	0,644
34	ESSA	450.000.000	1.100.000.000	0,409
35	RUIS	253.031.300	770.000.000	0,329
36	BIPI	13.103.493.050	31.985.962.000	0,410
37	BSSR	18.346.142.039	36.508.170.014	0,503
38	APEX	396.496.363	2.659.850.000	0,149

Lampiran 8

Pasal 74 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007

www.hukumonline.com

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;
- c. bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

Pasal 72

- (1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.
- (3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.
- (4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
- (6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 73

- (1) Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus.
- (2) RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

BAB V

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 74

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Lampiran 9

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 1998)

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

PSAK No. 1 (Revisi 1998)

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 1 (REVISI 1998) PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Paragraf-paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring (bold italic) adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks dengan paragraf-paragraf penjelasan serta Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk hal-hal yang tidak material.

Pendahuluan

Pemahaman dan dapat dibandingkannya laporan keuangan antar perusahaan akan semakin meningkat apabila laporan keuangan disajikan dalam format yang seragam dan menggunakan deskripsi yang sama untuk pos-pos yang sejenis. Namun demikian dalam kenyataannya keseragaman tersebut mungkin sulit diterapkan bahkan dapat menghalangi perusahaan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan.

Pernyataan ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan melalui:

- a) penerapan persyaratan dalam PSAK termasuk persyaratan pengungkapan;
- b) pemberian pedoman struktur laporan keuangan termasuk persyaratan minimum dari setiap komponen utama laporan, kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan;
- c) penetapan persyaratan praktis untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan Materialitas, Kelangsungan Usaha, Pemilihan Kebijakan Akuntansi dalam hal tidak ada pengaturan oleh PSAK, Konsistensi dan Penyajian Informasi Komparatif.

Tujuan

Tujuan pernyataan ini adalah menetapkan dasar-dasar bagi penyajian

sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi:

- a) aktiva;
- b) kewajiban;
- c) ekuitas;
- d) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; dan
- e) arus kas.

Informasi tersebut diatas beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas pada masa depan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

06 Manajemen perusahaan bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan.

Komponen Laporan Keuangan

07 *Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:*

- a) *neraca,*
- b) *laporan laba-rugi,*
- c) *laporan perubahan ekuitas,*
- d) *laporan arus kas, dan*
- e) *catatan atas laporan keuangan.*

Informasi Tambahan

08 Perusahaan dianjurkan untuk menyajikan telaahan keuangan yang menjelaskan karakteristik utama yang mempengaruhi kinerja keuangan, posisi keuangan perusahaan dan kondisi ketidakpastian

09 Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap

Lampiran 10

HASIL ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF DAN UJI ASUMSI KLASIK

1. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSRD _i	76	.253	.549	.37612	.079559
Komite Audit	76	1.000	6.000	3.06579	.660011
KDKI	76	.143	.667	.43255	.111910
KKI	76	.209	.972	.54891	.212817
KKA	76	.000	.968	.37867	.314806
KKP	76	.025	.679	.30149	.180193
Valid N (listwise)	76				

2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			76
Normal Parameters ^{a, b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.05363647
Most Extreme	Absolute		.047
Differences	Positive		.047
	Negative		-.043
Kolmogorov-Smirnov Z			.409
Asymp. Sig. (2-tailed)			.996

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

3. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.141	.050		2.835	.006		
Komite Audit	.056	.010	.463	5.527	.000	.927	1.078
KDKI	.079	.060	.112	1.321	.191	.908	1.101
KKI	.020	.035	.054	.575	.567	.738	1.355
KKA	.133	.022	.526	6.169	.000	.892	1.121
KKP	-.105	.039	-.237	-2.671	.009	.823	1.215

a. Dependent Variable: CSRD_i

4. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.739 ^a	.545	.513	.055519	2.235

a. Predictors: (Constant), KKP, KDKI, Komite Audit, KKA, KKI

b. Dependent Variable: CSRD_i

5. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.067	.029		2.346	.022
Komite Audit	-.002	.006	-.036	-.296	.768
KDKI	-.029	.035	-.105	-.847	.400
KKI	.002	.020	.014	.101	.920
KKA	-.009	.012	-.092	-.731	.467
KKP	-.012	.023	-.071	-.542	.590

a. Dependent Variable: ABS

Lampiran 11

HASIL UJI HIPOTESIS

1. Pengaruh Komite Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan CSR

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Komite Audit ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: CSRD_i

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.353 ^a	.125	.113	.074929

a. Predictors: (Constant), Komite Audit

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.059	1	.059	10.555	.002 ^a
	Residual	.415	74	.006		
	Total	.475	75			

a. Predictors: (Constant), Komite Audit

b. Dependent Variable: CSRD_i

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.246	.041		5.975	.000
Komite Audit	.043	.013	.353	3.249	.002

a. Dependent Variable: CSRD_i

2. Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tingkat Pengungkapan CSR

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	KDKI ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: CSRD_i

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.025 ^a	.001	-.013	.080070

a. Predictors: (Constant), KDKI

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.000	1	.000	.046	.832 ^a
Residual	.474	74	.006		
Total	.475	75			

a. Predictors: (Constant), KDKI

b. Dependent Variable: CSRDi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.368	.037		9.987	.000
KDKI	.018	.083	.025	.213	.832

a. Dependent Variable: CSRDi

3. Pengaruh Komposisi Kepemilikan Institusi Terhadap Tingkat Pengungkapan CSR

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	KKI ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: CSRDi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.194 ^a	.038	.025	.078572

a. Predictors: (Constant), KKI

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.018	1	.018	2.895	.093 ^a
Residual	.457	74	.006		
Total	.475	75			

a. Predictors: (Constant), KKI

b. Dependent Variable: CSRDi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.336	.025		13.411	.000
	KKI	.073	.043	.194	1.702	.093

a. Dependent Variable: CSRDi

4. Pengaruh Komposisi Kepemilikan Asing Terhadap Tingkat Pengungkapan

CSR

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	KKA ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: CSRDi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.550 ^a	.302	.293	.066895

a. Predictors: (Constant), KKA

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.144	1	.144	32.084	.000 ^a
	Residual	.331	74	.004		
	Total	.475	75			

a. Predictors: (Constant), KKA

b. Dependent Variable: CSRDi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.323	.012		26.845	.000
KKA	.139	.025	.550	5.664	.000

a. Dependent Variable: CSRDi

5. Pengaruh Komposisi Kepemilikan Publik Terhadap Tingkat Pengungkapan CSR

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	KKP ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: CSRDi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.335 ^a	.112	.100	.075477

a. Predictors: (Constant), KKP

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.053	1	.053	9.332	.003 ^a
Residual	.422	74	.006		
Total	.475	75			

a. Predictors: (Constant), KKP

b. Dependent Variable: CSRD_i**Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.421	.017		24.805	.000
KKP	-.148	.048	-.335	-3.055	.003

a. Dependent Variable: CSRD_i

6. Pengaruh Komite Audit, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Komposisi Kepemilikan Institusi, Komposisi Kepemilikan Asing dan Komposisi Kepemilikan Publik Terhadap Tingkat Pengungkapan CSR

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	KKP, KDKI, Komite Audit, KKA, KKI ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.739 ^a	.545	.513	.055519

a. Predictors: (Constant), KKP, KDKI, Komite Audit, KKA, KKI

b. Dependent Variable: CSRDi

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.259	5	.052	16.802	.000 ^a
Residual	.216	70	.003		
Total	.475	75			

a. Predictors: (Constant), KKP, KDKI, Komite Audit, KKA, KKI

b. Dependent Variable: CSRDi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.141	.050		2.835	.006
Komite Audit	.056	.010	.463	5.527	.000
KDKI	.079	.060	.112	1.321	.191
KKI	.020	.035	.054	.575	.567
KKA	.133	.022	.526	6.169	.000
KKP	-.105	.039	-.237	-2.671	.009

a. Dependent Variable: CSRDi

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	.25101	.49285	.37612	.058760	76
Residual	-.108102	.113899	.000000	.053636	76
Std. Predicted Value	-2.129	1.987	.000	1.000	76
Std. Residual	-1.947	2.052	.000	.966	76

a. Dependent Variable: CSRDi

